**STUDI PERENCANAAN PENDIDIKAN**

**PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA**

**DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

****

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan

Program Pascasarjana Universitas Mataram

Oleh :

**AHMAD RIYADI**

**NIM : I2K 013 004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2017**

**PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS**

Tesis dengan judul :

**“ Studi Perencanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Lombok Timur “** yang ditulis oleh Ahmad Riyadi, NIM. I2K013004 telah diujikan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dan disahkan/disetujui oleh Pembimbing I dan II.

Mataram, Januari 2017

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Agus Ramdani, M.Sc Drs. Untung Waluyo, MA, Ph.D

NIP. 19640123 198803 1 002 NIP. 19610328 198803 1 002

Mengetahui :

Ketua Prodi MAP,

Dr. Sudirman Wilian, MA

NIP. 19590505 198502 1 001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS**

Tesis dengan judul :

**“ Studi Perencanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Lombok Timur “** yang ditulis oleh Ahmad Riyadi, NIM. I2K013004 telah diujikan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dan disahkan/disetujui oleh Tim Penguji.

Mataram, Januari 2017

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tanda Tangan |
| Ketua PengujiDr Agus Ramdani, M.ScNIP. 19640123 198803 1 002 | ........................................................... |
| Anggota Penguji IDrs. Untung Waluyo, MA., Ph.D NIP. 19610328 198803 1 002 | ........................................................... |
| Anggota Penguji IIDr. Dadi Setiadi, M.ScNIP. 19620903 198903 1 003 | ........................................................... |
| Anggota Penguji IIIDr. Sudirman Wilian, MANIP. 19590505 198502 1 001 | ........................................................... |

Mengetahui :

|  |  |
| --- | --- |
| Direktur Pascasajana Universitas Mataram,Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc,Agr,Ph.D.NIP. 19621231 198703 1 394 | Ketua Program Studi MAP,Dr. Sudirman Wilian, MANIP. 19590505 198502 1 001 |

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Riyadi

NIM : I2K013004

Jurusan/Prodi : Magister Administrasi Pendidikan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“Studi Perencanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Lombok Timur”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini yang merupakan kutipan dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ditemukan plagiasi dan pelanggaran terhadap norma, kaidah dan etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, maka saya siap menanggung resiko berupa sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mataram, Januari 2017

Penulis,

Materai Rp. 6.000.-

Ahmad Riyadi

NIM : I2K013004

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga tesis yang berjudul “Studi Perencanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Lombok Timur” ini dapat diselesaikan. Tesis ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Selesainya penulisan tesis ini tentu tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M. Sc, Agr, Ph. D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram.
2. Dr. Sudirman Wilian, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Program Pascasarjana Universitas Mataram.
3. Dr. Agus Ramdani, M. Sc, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Drs. Untung Waluyo, MA, Ph. D, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap jajaran pegawai Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Progran Pascasarjana Universitas Mataram.
6. Teman-teman Mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram.
7. Rekan-rekan di Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur.
8. Kepala SMK Al-Ijtihad Masbagik beserta guru dan staf.
9. Kepala SMK Darul wustho Jerowaru beserta guru dan staf.
10. Kepala SMK Maraqitta`limat Suela beserta guru dan staf.
11. Kepala SMK Gunung Rinjani Lombok beserta guru dan staf.
12. Kepala SMK Rahmatullah NW Jenggik beserta guru dan staf.
13. Kepala SMK Kesehatan NW Teros beserta guru dan staf.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

atas segala bentuk bantuan, masukan, arahan, dorongan dan motivasinya kepada penulis.

Secara khusus, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Istri, anak-anak dan semua keluarga, atas segenap cinta kasih dan do`a - do`anya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam tesis ini, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan dan seluruh pembaca.

Mataram, Januari 2017

Penulis,

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala – Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang – yang telah memberikan kelapangan dan petunjukNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Studi Perencanaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Lombok Timur*”.

Tesis ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi dan tujuan sekolah, rencana kerja sekolah serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan pada sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Lombok Timur. Penulis menyadari bahwa masih banyak bagian dari tesis ini yang masih perlu disempurnakan, untuk itu segala masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya, semoga Alloh SWT. senantiasa memberikan petunjukNya, dan semoga tesis ini dapat memberi manfaat khususnya bagi dunia pendidikan.

Mataram, Januari 2017

Penulis,

**STUDI PERENCANAAN PENDIDIKAN**

**PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA**

**DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**OLEH :**

**Ahmad Riyadi**

**NIM. I2K 013 004**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap rumusan visi, misi dan tujuan sekolah, rumusan rencana kerja sekolah serta partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta kecil dengan lokasi penelitian yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 20 orang perkelas, antara 20 orang sampai dengan 32 orang perkelas, dan lebih dari 32 orang perkelas. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang jelas, yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pengelola sekolah dalam pengelolaan sekolah menuju sebuah kondisi ideal yang diharapkan, sedangkan rumusan rencana kerja sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah lokasi penelitian ini belum memenuhi seluruh unsur perencanaan sebagaimana diatur dalam standar pengelolaan sekolah. Rencana kerja sekolah belum memuat komponen-komponen rencana kerja secara lengkap. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini masih terbilang rendah. Masyarakat belum diberi ruang dan kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam pengelolaan sekolah, termasuk dalam perumusan perencanaan pendidikan.

***Kata Kunci :*** *visi, misi dan tujuan sekolah, rencana kerja sekolah, partisipasi masyarakat.*

**THE STUDI OF EDUCATIONAL PLANNING**

**FOR PRIVATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL (SMK)**

**IN EAST LOMBOK REGENCY**

**By :**

**Ahmad Riyadi**

**NIM. I2K 013 004**

**ABSTRACT**

This study aims to reveal the vision statement, mission and purpose of school, the formulation of school work plan and community participation in formulating the educational planning in the private vocational high school (SMK) in East Lombok Regency. This study is a case study research which uses qualitative approach. The objects of this research are small private vocational high school (SMK) with research sites are classified into three groups, namely schools with the number of students under 20 in each classes, between 20 up to 32 students in each classes and over 32 students in each classes. Informants in this study were principals, vice-principals, teachers, and school committees are taken by purposive sampling technique. Data collection of the study conducted by using interview and documentation technique. The results showed that theare no statement of vision, mision and the purpose of the school is clear, which can be used as the guide for school manager in school management toward an ideal condition that is expected, while the frame of school work plan owned schools study site has not complied with all planning element as set forth in the standard school management. School work plan heve not loaded the components of a complete work plan. In addition the level of community participation in school study site is still fairly low. Society has not given the space and opportunity to be directly involved in school management, including in the formulation of educational planning.

***Keywords :*** *vision, mission and target of the school, school work plan, public participation.*

**DAFTAR ISI**

 Halaman

|  |  |
| --- | --- |
| Halaman Judul.............................................................................................Halaman Pengesahan Pembimbing..............................................................Permohonan Ujian Tesis..............................................................................Pernyataan Keaslian Karya..........................................................................Ucapan Terima Kasih...................................................................................Kata Pengantar.............................................................................................Abstrak.........................................................................................................Daftar Isi......................................................................................................Daftar Tabel/Gambar...................................................................................BAB I : PENDAHULUAN1. Latar Belakang Masalah.......................................................................
2. Fokus Penelitian....................................................................................
3. Rumusan Masalah.................................................................................
4. Tujuan Penelitian..................................................................................
5. Manfaat Penelitian................................................................................

BAB II : KAJIAN TEORETIK1. Hasil Penelitian yang Relevan..............................................................
2. Deskripsi Konseptual............................................................................
3. Manajemen (Pengelolaan) ............................................................
4. Pengertian Pengelolaan Pendidikan.......................................
5. Fungsi-fungsi Manajemen (Pengelolaan)...............................
6. Perencanaan dalam Manajemen (Pengelolaan).............................
7. Pengertian Perencanaan..........................................................
8. Tujuan dan Fungsi Perencanaan.............................................
9. Jenis-jenis Perencanaan..........................................................
10. Pendekatan Perencanaan Pendidikan......................................
11. Kepala Sekolah Sebagai Manajer dan Pemimpin..........................
12. Fungsi Manajer.......................................................................
13. Fungsi Pemimpin....................................................................
14. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)............................................
15. Tujuan.....................................................................................
16. Pembelajaran di SMK.............................................................
17. Kerangka Berpikir.................................................................................

BAB III : METODE PENELITIAN1. Pendekatan Penelitian...........................................................................
2. Latar Penelitian.....................................................................................
3. Data dan Sumber Data..........................................................................
4. Data................................................................................................
5. Sumber Data..................................................................................
6. Teknik Pengumpulan Data...................................................................
7. Wawancara (Interview).................................................................
8. Studi Dokumentasi........................................................................
9. Teknik Analisis Data............................................................................
10. Reduksi Data.................................................................................
11. Penyajian Data...............................................................................
12. Penarikan Simpulan.......................................................................
13. Pemeriksaan Keabsahan Data...............................................................
14. Kredibilitas.....................................................................................
15. Transferabilitas..............................................................................
16. Dependabilitas...............................................................................
17. Komfirmabilitas.............................................................................

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN1. Latar Penelitian.....................................................................................
2. Deskripsi Data Hasil Penelitian............................................................
	1. Data Hasil Wawancara..................................................................
3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah...............................................
4. Rencana Kerja Sekolah...........................................................
5. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pendidikan.........
	1. Data Hasil Studi Dokumentasi.......................................................
6. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah...............................................
7. Rencana Kerja Sekolah...........................................................
8. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pendidikan.........
9. Pembahasan Hasil Penelitian...............................................................
10. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah......................................................
11. Rencana Kerja Sekolah.................................................................
12. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pendidikan................
13. Refleksi Penelitian................................................................................
14. Kegiatan Penelitian........................................................................
15. Kendala-kendala yang dihadapi Peneliti.......................................

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN1. Simpulan...............................................................................................
2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah......................................................
3. Rencana Kerja Sekolah.................................................................
4. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pendidikan................
5. Implikasi Penelitian..............................................................................
6. Implikasi Teoritis...........................................................................
7. Implikasi Praktis............................................................................
8. Saran.....................................................................................................

DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN-LAMPIRAN1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Contoh Pertanyaan Wawancara
4. Transkrip Hasil Wawancara
 | iiiiiiivvviiviiixxiv18 899111414141819212325273939414344454851525353535455565758596061616263636573757581929696114120121121126137141141143151151152152153153154155158 |

**DAFTAR TABEL / GAMBAR**

Halaman

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 2.1.......................................................................................................Tabel 4.1.......................................................................................................Tabel 4.2.......................................................................................................Tabel 4.3......................................................................................................Tabel 4.4......................................................................................................Gambar 2.1................................................................................................... | 187411211611950 |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, karena melalui pendidikan, seseorang memiliki peluang mengubah masa depan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat dimana ia tinggal, dan seterusnya untuk negara, serta kehidupan umat manusia pada umumnya, karena pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia, agar menjadi manusia yang mampu berpikir kreatif, produktif, mandiri, serta dapat membangun dirinya dan masyarakatnya (Tilaar, 2010:21).

Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, upaya untuk menemukan sistem penyelenggaraan dan pola pengelolaan pendidikan terus dilakukakan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang diselenggarakannya pendidikan secara desentralisasi. Maksudnya, pemerintah menyerahkan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kewenangan untuk membuat keputusan dan perencanaan sendiri dalam mengatasi permasalahan bidang pendidikan (Pasal 11). Sebelumnya, sistem pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan maupun penentuan keberhasilannya masih

didominasi oleh pemerintah pusat (sentralisasi), akibatnya inisiatif daerah cenderung bersifat pasif, bekerja hanya atas dasar petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat (Danim, 2010:41).

Sejalan dengan gagasan desentralisasi pengelolaan pendidikan tersebut, diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Salah satu program pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang dinyatakan di dalam undang-undang tersebut adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/comunity based education*) (Danim, 2008:7).

Senada dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan : “pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas” (Pasal 49). Hal ini menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan pemerintah tidak hanya sampai di tingkat daerah, tetapi lebih jauh lagi sampai di tingkat satuan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar dalam

pengelolaan sekolah. Sekolah mendapat peluang untuk berkembang dan mengatur proses pendidikan sesuai dengan potensi lingkungan yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengambilan keputusan. Hal ini menuntut diberdayakannya fungsi-fungsi pengelolaan sekolah secara maksimal agar dapat berjalan secara efektif untuk menghasilkan mutu lulusan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk tujuan tersebut, maka pendidikan perlu didukung oleh seperangkat instrumen yang akan mendorong sekolah berupaya meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pengelolaannya secara terus-menerus sehingga mampu berkembang menjadi sebuah organisasi pembelajaran (*learning organization*).

Selain itu, terbukanya keran desentralisasi pendidikan, telah melahirkan *euphoria* bagi kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk pendirian lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya didirikan sekolah-sekolah swasta terutama sekolah-sekolah kejuruan. Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur, dalam tiga tahun terakhir ini (2013 – 2016), terdapat 18 sekolah baru yang mengantongi surat izin operasional, sedangkan jumlah seluruh sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta pada tahun pelajaran 2015/2016 ini, sebanyak 55 sekolah yang tersebar di 16 kecamatan.

Keberadaan sekolah-sekolah swata ini tentu merupakan kabar menggembirakan, karena itu berarti kebutuhan warga masyarakat usia 16 – 18 tahun terhadap sekolah menengah kejuruan diharapkan dapat terpenuhi. Dari sisi pemerintah, keberadaan sekolah-sekolah swasta ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan peran yang sangat besar dalam sistem pendidikan nasional, karena dengan adanya sekolah-sekolah swasta akan membantu pemerataan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Harapan masyarakat tersebut tentu tidak berhenti pada terpenuhinya

kebutuhan terhadap lembaga pendidikan saja, tetapi harus terpenuhi dari sisi kualitasnya. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan oleh para pengelola sekolah-sekolah swasta, adalah keseimbangan dalam menyiapkan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pendidikan di sekolahnya. Maksud dari *hardware* sebuah sekolah antara lain : (1) gedung, ruang kelas dan perlengkapan yang ada di dalamnya, (2) buku teks dan alat serta sumber belajar, (3) ruang laboratorium, (4) ruang perpusatakaan beserta isinya. Adapun yang dimaksud dengan *software* sebuah sekolah seperti : (1) guru yang profesional, (2) program sekolah yang ditata dan direncanakan dengan baik, (3) kurikulum, (4) dan lain-lain.

Selain dua hal di atas (*hardware* dan *software*), yang juga perlu diperhatikan adalah sistem pengelolaannya, karena kualitas proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dua segi, yaitu kualitas komponen pendidikan dan kualitas pengelolaannya. Kualitas komponen yang baik, seperti tersediannya sarana dan prasarana, serta biaya yang cukup, jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang handal maka pencapaian tujuan tidak akan optimal. Begitupun sebaliknya, meskipun sistem pengelolaannya baik tetapi jika sekolah dalam kondisi yang serba kekurangan, maka akan mengakibatkan hasil yang tidak optimal pula (Tirtarahardja dan La Sulo, 2005:41). Oleh karena itu, seluruh aspek pendukung keberlangsungan pendidikan harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan matang.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada beberapa SMK swasta, ditemukan fakta sebagai berikut : (1) jumlah peserta didik yang sedikit, (2) jurusan yang dibuka tidak sesuai dengan potensi lingkungan dan kebutuhan masyarakat, (3) lokasi sekolah yang sulit dijangkau, (4) tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan bidangnya, (5) sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan (6) partisipasi masyarakat dan kemitraan yang rendah.

Fakta-fakta ini menurut peneliti kemungkinan disebabkan oleh kurang maksimalnya sistem pengelolaan pendidikan pada beberapa SMK swasta tersebut, terutama pada aspek perencanaannya. Atas dasar itu, maka kemampuan dan keterampilan pengelolaan (manajemen) menjadi suatu tuntutan terutama bagi kepala sekolah sebagai seorang manajer di sekolahnya. Berkembangnya iklim akademik dan kekompakan dalam kerja dapat terwujud karena keberhasilan pengelolaan sekolah yang mengarah kepada terbentuknya kesatuan peran komponen pendukungnya, seperti guru, karyawan, peserta didik, dan orang tua.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam sistem pengelolaan sekolah adalah aspek perencanaan yang meliputi : visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah. Di samping itu, para pengelola sekolah juga harus dapat memahami keinginan dan kebutuhan konsumen (masyarakat), membangun hubungan kerjasama yang bersifat partisipatif, serta merancang strategi yang tepat dalam merumuskan perencanaan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam

tentang sistem pengelolaan sekolah khususnya aspek perencanaan pada SMK swasta yang ada di Kabupaten Lombok Timur, terutama sekolah-sekolah yang memiliki 3 – 6 kelas/rombongan belajar (rombel) yang dalam Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun2013 disebut sebagai sekolah kecil (Sutanto, 2013), guna memperoleh informasi dan gambaran tentang perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh para pengelola sekolah-sekolah tersebut.

Hal ini dianggap penting oleh peneliti, sehingga melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi tentang perencanaan pendidikan pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur, kekurangan-kekurangannya serta fenomena-fenomena yang terjadi, untuk selanjutnya dapat diperbaiki pada masa yang akan datang.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada sistem perencanaan pendidikan pada SMK-SMK swasta, yang meliputi :

1. Visi, misi dan tujuan sekolah.
2. Rencana kerja sekolah.
3. Partisipasi masyarakat.
4. **Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah rumusan visi, misi dan tujuan sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur ?

Rumusan ini dapat dikhususkan lagi menjadi :

1. Bagaimanakah keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur ?
2. Bagaimanakah proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur ?
3. Sejauhmana perhatian dan pemahaman semua stakeholder terhadap visi, misi dan tujuan sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur ?
4. Bagaimanakah rumusan rencana kerja sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur ?

Secara spesifik rumusan ini dapat diperinci menjadi :

1. Bagaimanakah keberadaan rencana kerja sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur ?
2. Apa yang menjadi dasar perumusan rencana kerja sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur ?
3. Apakah rencana kerja sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur memuat komponen rencana kerja secara lengkap ?
4. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pendidikan pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur ?
5. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengungkap :

1. Rumusan visi, misi dan tujuan sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur, dilihat dari :
2. Keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah.
3. Proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.
4. Perhatian dan pemahaman warga sekolah terhadap visi, misi dan tujuan sekolah.
5. Rumusan rencana kerja sekolah pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur, dilihat dari :
6. Keberadaan rencana kerja sekolah.
7. Dasar perumusan rencana kerja sekolah.
8. Komponen rencana kerja sekolah.
9. Partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pendidikan pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur.
10. **Manfaat Penelitian**
11. ***Secara Teoritis***

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah pengelolaan pendidikan pada tingkat kelembagaan (satuan pendidikan) khususnya pada aspek perencanaan.

1. ***Secara Praktis***
2. Bagi Peneliti :

Menambah wawasan bidang penelitian, sehingga dapat mengetahui gambaran tentang sistem pengelolaan SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur khususnya pada aspek perencanaanya.

1. Bagi para pengelola lembaga pendidikan :

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi berkaitan dengan perencanaan pendidikan pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan khususnya pada aspek perencanaanya di sekolah.

1. Bagi Pejabat Struktural Pendidikan :

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan sistem pengelolaan pendidikan pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur.

**BAB II**

**KAJIAN TEORETIK**

1. **Hasil Penelitian yang Relevan**

Perencanaan pendidikan telah lama menjadi bidang kajian yang tersendiri dan diminati baik oleh para pendidik maupun akademisi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak cerita sukses (*success story*) sekolah karena kemampuan kepala/pengelola sekolah menggunakan pola perencanaan yang inovatif dan partisipatif. Sebagai contoh, dalam penelitian studi kasus di tiga sekolah di Israel, Tubin (2009) melaporkan bahwa keberhasilan program inovasi dari sekolah-sekolah yang ditelitinya tak lepas dari pola perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, Mc. Namara dkk. (2002), dalam analisisnya tentang perkembangan terakhir perencanaan pengembangan sekolah dan evaluasi seluruh sekolah di Republik Irlandia mendapati bahwa keterbukaan dan akuntabilitas publik menjamin terbentuknya perencanaan yang efektif. Karenanya, partisipasi aktif orang tua, guru, staf sekolah dan masyarakat luas sangat menentukan kualitas hasil perencanaan.

Di Indonesia, perencanaan pendidikan juga telah menjadi bidang kajian tersendiri yang banyak diminati oleh kalangan akademisi. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2009) pada sekolah-sekolah menengah (SMA/MA/SMK) negeri di Kota Tanjungbalai. Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari hubungan perencanaan sumber daya pendidikan dengan mutu lulusan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 12 sekolah menengah negeri (7 SMAN, 1 MAN, dan 4 SMKN), dengan sasaran 12 kepala sekolah, 447 guru dan komite sekolah. Adapun jumlah sampelnya adalah delapan sekolah (5 SMAN, 1 MAN, dan 2 SMKN) dengan sasaran delapan kepala sekolah dan 340 guru dan komite sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan terhadap sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat berpengaruh nyata terhadap kualitas lulusan dalam mendapatkan kesempatan kerja.

Tanpa mengurangi makna dan manfaat penelitian ini, kelemahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah tidak dijelaskannya bagaimana perencanaan sumber daya pendidikan pada sekolah menengah di Kota Tanjungbalai memberi pengaruh terhadap mutu lulusan dalam mendapatkan kesempatan kerja, karena mutu lulusan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya pendidikan, tetapi ditentukan juga oleh kinerja dan kualitasnya, serta kualitas proses pemdidikan yang terjadi di dalamnya.

Contoh lain, penelitian yang dilakukan oleh Suyatno tentang faktor-faktor penentu kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah menengah di Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen sekolah, integritas kepala sekolah dan lingkungan sekolah terhadap kualitas pendidikan terutama pada SMA swasta. Penelitian ini dilakukan di 30 SMA swasta dengan jumlah responden sebanyak lima orang dari masing-masing sekolah. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kualitas sekolah dapat ditingkatkan melalui perbaikan dan peningkatan manajemen sekolah, peningkatan integritas kepala sekolah, dan penciptaan lingkungan sekolah yang lebih kondusif.

Lebih lanjut Suyatno menyatakan bahwa untuk menciptakan produk yang berkualitas, selain peningkatan integritas kepala sekolah dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif, diperlukan perhatian secara seksama terhadap perencanaan pendidikan yang merupakan bagian dari manajemen. Tanpa perencanaan yang terarah dan jelas, dapat terjadi kesimpangsiuran di dalam komunitas kerja sekolah. Agar semua kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik, lancar, efektif, dan efisien, komunitas sekolah harus dapat merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah terlebih dahulu serta menetapkan strategi untuk mencapainya. Kemudian mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua aktivitas sekolah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan yang efektif dapat diperoleh dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik dan pola perencanaan yang matang, termasuk perencanaan terhadap sumber daya pendidikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan program inovasi sekolah, dan hal ini akan memberi pengaruh yang nyata terhadap kualitas lulusan dalam mendapatkan kesempatan kerja. Oleh karena itu maka, diperlukan perhatian secara seksama terhadap perencanaan pendidikan, sebab tanpa perencanaan yang terarah dan jelas, dapat terjadi

kesimpangsiuran di dalam komunitas kerja sekolah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yang mengkaji arti pentingnya perencanaan, penelitian ini mengkaji tentang rumusan perencanaan pendidikan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan dan rumusan visi, misi dan tujuan sekolah pada sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Lombok Timur khususnya pada sekolah-sekolah kecil yang memiliki 3 - 6 kelas/rombongan belajar.

1. **Deskripsi Konseptual**
2. **Manajemen (Pengelolaan)**

Manajemen dan pengelolaan adalah dua kata yang memiliki makna yang sama. Istilah manajemen berasal dari kata *"manage"* (bahasa Inggris) yang padanannya dalam bahasa Indonesia "kelola" yang berarti mengatur (Depdiknas, 2008:127). Pendapat lain mengatakan bahwa kata manajemen berasal dari kata *"to mange"* yang berarti mengelola (Rohiat, 2012:14). Karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua kata tersebut untuk maksud dan makna yang sama.

1. Pengertian Pengelolaan Pendidikan

Setiap organisasi, termasuk di dalamnya organisasi pendidikan (sekolah) sangat memerlukan pengelolaan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen menurut Wahjosumidjo (2003:93), adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap individu dalam organisasi memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda, kerena itu, proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumber daya organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting agar semua perbedaan yang terjadi dapat dikelola menjadi kekuatan. Setelah setiap individu masuk ke dalam kepentingan dan tujuan organisasi maka perilaku mereka akan menjadi perilaku organisasi untuk kebersamaan.

Menurut Fattah (2012:36), manajemen mengandung arti optimalisasi sumber-sumber daya atau pengelolaan dan pengendalian. Artinya, bahwa seluruh potensi yang dimiliki organisasi harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sistem pengelolaan dan pengendalian yang tepat, guna tercapainya tujuan organisasi.

Hasibuan (1997:1) menyatakan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses mendayagunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun sumber-sumber lainnya membutuhkan ilmu dan seni agar proses tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Ilmu mengajarkan kita tentang sesuatu, sedangkan seni mengajarkan kita bagaimana melakukan sesuatu.

Menurut Siagian (2008:3), [manajemen](http://belajarpsikologi.com/pengertian-manajemen-pendidikan/) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kerjasama dan kekompakan di dalam organisasi dapat terwujud jika setiap anggota mempunyai perasaan bahwa dirinya merupakan bagian dari organisasi dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan organisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1:1 menyatakan bahwa “pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional”. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengerah-kan tindakan, dan mengendalikan seluruh sumber daya pendidikan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat perbedaan antar yang satu dengan yang lain, namun perbedaan-perbedaan tersebut hanya bersifat redaksional semata. Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut mengandung maksud dan tujuan yang sama. Inti dari pengelolaan adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya yang dimaksudkan adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa, kurikulum, dana, dan sarana-prasarana. Selain itu, yang penting dikedepankan dalam manajemen adalah kerjasama antar individu yang merupakan bagian dari sebuah organisasi.

**Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses pendayagunaan semua potensi dan sumber daya pendidikan yang terlibat dalam sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, yang** mengandung tiga dimensi utama, yaitu : *Pertama* dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (kepala sekolah) bersama orang lain atau kelompok. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya kemampuan dan keterempilan khusus yang perlu dimiliki pengelola untuk melakukan interaksi serta mempengaruhi orang lain baik melalui hubungan perorangan maupun kelompok. *Kedua*, kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Maksudnya, bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. *Ketiga*, pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan organisasi. Dengan kata lain tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang dilakuan bersama orang lain baik perorangan maupun kelompok.

1. Fungsi-Fungsi Manajemen (Pengelolaan)

Pada umumnya fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi, sebagaimana dikemukakan oleh G.R. Terry, John F. Mee, Louis A. Allen, maupun Mc. Namara, meskipun empat fungsi yang mereka kemukakanpun berbeda-beda. Di luar itu, Henry Fayol, Harold Koontz dan Cyril O’donnel, dan P. Siagian justru menyebutkan ada lima fungsi manajemen, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari itu. Karena perbedaan-perbadaan tersebut, menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk mendefinisikan fungsi manajemen secara pasti.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan-perbedaan fungsi manajemen menurut para ahli tersebut dapat peneliti paparkan pada Tabel 2.1. sebagai berikut (Hasibuan, 1997:6) :

Tabel 2.1. : Fungsi-Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G. R. Terry** | **John F. Mee** | **Louis A. Allen** | **Mc. Namara** |
| 1. Planning2. Organizing3. Actuating4. Controlling | 1. Planning2. Organizing3. Motivating4. Controlling | 1. Leading2. Planning3. Organizing4. Controlling | 1. Planning2. Programming3. Actuating4. Controlling |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henry Fayol** | **Harold Koontz****Cyril O’donnel** | **P. Siagian** | **Oey Liang Lee** |
| 1. Planning2. Organizing3. Commanding4. Coordinating5. Controlling | 1. Planning2. Organizing3. Staffing4. Directing5. Controlling | 1. Planning2. Organizing3. Motivating4. Controlling5. Evaluating | 1. Perencanaan2. Pengorganisasian3. Pengarahan4. Pengkoordinasian5. Pengontrolan |
| **W.H. Newman** | **Luther Gullick** | **Lindall F. Urwick** | **John D. Millet** |
| 1. Planning2. Organizing3. Assembling Resources4. Directing5. Controlling | 1. Planning2. Organizing3. Staffing4. Directing5. Coordinating6. Reporting7. Budgetting | 1. Forecasting2. Planning3. Organizing4. Commanding5. Coordinating6. Controlling | 1. Directing2. Fasilitating |

Perbedaan rumusan fungsi-fungsi manajemen yang terjadi di antara para ahli di atas kemungkinan disebabkan karena perbedaan pada pendekatan dan sudut pandang masing-masing tentang manajemen, tergantung pada organisasi apa proses manajemen tersebut dilaksanakan. Namun demikian, satu hal yang penting digarisbawahi, bahwa dalam perbedaan-perbedaan itu, hampir semua ahli tersebut menyebutkan perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen, bahkan mereka menempatkannya pada posisi yang sangat penting dan sangat menentukan.

1. **Perencanaan dalam Manajemen (Pengelolaan)**

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen di atas, perencanaan (*planning*) merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah aktivitas seseorang ataupun sekelompok orang, karena perencanaan merupakan fungsi dasar dari manajemen. Bahkan, Sa’ud dan Makmun (2011:4) dengan tegas menyatakan bahwa “perencanaan merupakan fungsi utama dan pertama dalam manajemen”.

Begitu pentingnya posisi perencanaan dalam menajemen, maka para pengelola dituntuk untuk memiliki kemampuan untuk menyusun rencana kerja yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang dibutuhkan.

Tidak ada kewajiban bahwa kenyataan harus sesuai dengan rencana, begitupun juga tidak ada jaminan bahwa rencana sepenuhnya akan menjadi kenyataan, namun demikian, perencanaan tetap diperlukan karena dapat dijadikan sebagai peta atau penunjuk jalan yang akan memberikan tuntunan tentang arah yang akan dituju dan kenyataan apa yang diinginkan. Dalam perencanaan juga akan ditentukan langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar tersebut, maka adanya perencanaan sebelum melakukan suatu kegiatan merupakan sebuah keharusan.

Jika sesuatu hal yang telah direncanakan saja tidak dapat dijamin akan berjalan mulus sesuai dengan harapan, bahkan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi apabila suatu kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan, tentunya kegiatan tersebut akan mendatangkan resiko yang lebih besar ketika dijumpai berbagai gangguan, bahkan bisa jadi kegagalan pada saat pelaksanaannya. Apalagi kalau kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berskala besar dan sangat penting bagi

kehidupan manusia, seperti pendidikan.

Sesuatu tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan

(*Everything won't go as smooth as planned*). Ungkapan ini menggambarkan peran besar perencanaan dalam menekan resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena dengan perencanaan kita dapat memprediksi hal-hal tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di masa depan, sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan antisipatif sejak dini.

1. Pengertian Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannypa, kapan mengerjakan-nya, siapa yang akan mengerjakannya, dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya (Ranupandojo, 1996:11). Definisi ini menegaskan bahwa perencanaan merupakan fungsi yang tidak terpisahkan, bahkan memberi arah bagi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Bagaimna mengerjakannya (fungsi *actuating*), siapa yang akan mengerjakannya (fungsi *organizing*), dan bagaimana mengukur keberhasilannya (fungsi *controling*).

Menurut Amirullah dan Randyah Hanafi (2002:49), perencanaan adalah suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti bahwa upaya untuk mencapai tujuan tidak cukup hanya dengan menentukan satu tindakan saja, tetapi harus ada beberapa alternatif tindakan yang harus disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila satu tindakan yang telah diambil, tidak memberi hasil yang maksimal.

Pendapat lain mengatakan bahwa perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai (Terry dan Rue, 2010:43).

Berdasarkan beberapa pengertian perencanaan di atas, bila dikaitkan dengan pendidikan, maka dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan dalam penelitian ini adalah proses berpikir secara cermat dan rasional dalam menyusun dan menetapkan tujuan-tujuan pendidikan serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada kurun waktu tertentu secara sistematis, efektif, dan efisien serta bagaimana mengontrol dan mengevaluasinya. Jadi, di dalam perencanaan terdapat beberapa unsur, yaitu : (1) tujuan yang ingin dicapai, (2) kegiatan yang dilakukan, (3) jangka waktu tertentu, dan (4) cara-cara yang akan digunakan serta bagaimana mengukur keberhasilannya.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami pentingnya posisi perencanaan dalam pendidikan, oleh karena itu para perencana pebdidikan dituntut untuk memliki kemampuan mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dab ancaman yang dapat mempengaruhi proses perencanaan, seperti menguasai berbagai jenis

pendekatan dalam perencanaan (Sa`ud dan Mkmun, 2011:42).

1. Tujuan dan Fungsi Perencanaan (*Planning*)
2. Tujuan :

Menurut Usman (2006:47-48), ada beberapa tujuan perencanaan, yaitu : (1) menjadi standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanaan dengan perencanaan, (2) mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan, (3) mengetahaui siapa yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasinya maupun kuantitasnya, (4) mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, (5) memimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu, (6) memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, (7) menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan, (8) mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, (9) mengarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian, maka tujuan perencanaan dapat dikatakan sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan harapan (rencana).

Atmodoworio (2000:79), melihat perencanaan dari segi

pengambilan keputusan, bertujuan untuk : (1) penyajian rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang, dan (2) menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang/satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan.

Sa’ud dan Makmun (2011:12) mengemukakan bahwa :

“Tujuan perencanaan pendidikan adalah menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah (menyusun alternatif dan prioritas kegiatan) yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pada masa yang akan datang dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan pendidikan”.

Dengan demikian, maka tujuan perencanaan dapat dikatakan sebagai : (1) jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, (2) pemberi pengarahan kepada para administrator maupun non-administrator, (3) cara untuk menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang-tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas-aktivitas, dan (5) alat menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi.

1. Fungsi :

Fungsi perencanaan menurut Sa’ud dan Makmun (2011:*5*) adalah : (1) sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, (2) menghindari pemborosan sumber daya, (3) alat bagi pengembangan *quality assurance*, dan (4) upaya untuk memenuhi *accountability* kelembagaan.

Usman (2006:48) menyatakan bahwa perencanaan memiliki fungsi atau manfaat sebagai : (1) standar pelaksanaan dan pengawasan, (2) pemilihan berbagai alternatif terbaik, (3) penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan, (4) menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, (5) membentu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, (6) alat memudahkan dalam berkomunikasi dengan pihak terkait, dan (7) alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah fungsi pengelolaan yang tidak boleh diabaikan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan, karena tanpa perencanaan, seseorang maupun sekelompok orang akan kehilangan arah dan semangat, bahkan justru akan melahirkan kebingungan bagi para pelaku tindakan itu sendiri. Setiap organisasi harus memiliki perencanaan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan, karena dengan adanya perencanaan maka : (1) pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah, (2) diperoleh gambaran tentang hal-hal yang akan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, (3) dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dengan memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik, (4) dapat ditentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan pentingnya tujuan dan kebutuhan organisasi,

(5) dapat dilakukan pengawasan dan pengukuran kinerja.

1. Jenis-jenis Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan target waktu peleksanaannya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

* + 1. Perencanaan jangka panjang (*long term planning*)

Perencaan jangka panjang tidak menampilkan sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan (Usman, 2006:52). Perencanaan ini dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lima tahun atau lebih dan biasanya bersifat strategis, yaitu perencanaan yang bersifat umum dengan fokus utamanya adalah organisasi secara keseluruhan. Perencanaan jangka panjang atau perencanaan starategis diperlukan sebagai kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya (Amirullah dan Randyah Hanafi, 2002:53).

* + 1. Perencanaan jangka menengah (*medium term planning*)

Perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran atau uraian perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini meskipun masih bersift umum tetapi sudah menampilkan sasaran-sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaanya antara tiga sampai delapan tahun (Usman, 2006:52).

* + 1. Perencanaan jangka pendek (*short term planning*)

Perencanaan jangka pendek disebut juga perencanaan

operasional, yaitu pendefinisian tentang apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan starategis yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu satu tahun (Amirullah dan Randyah Hanafi, 2002:54). Dengan demikian, maka perencanaan jangka pendek diperlukan untuk menerjemahkan perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah dalam bentuk aktivitas dan tindakan-tindakan yang riil dan terinci secara jelas.

Berdasarkan obyeknya, Atmodiwirio (2000:82), membagi perencanaan menjadi dua, yaitu :

* 1. Perencanaan rutin, yaitu suatu proses mempersiapkan kegiatan

atau suatu kumpulan pekerjaan yang bersifat terus menerus dalam rangka usaha mencapai hasil akhir suatu program.

* 1. Perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan yang dapat menjangkau waktu panjang, sedang, dan pendek.
1. Pendekatan Perencanaan Pendidikan

Beberapa pendekatan dalam perencanaan pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pendekatan tuntutan masyarakat atau disebut juga pendekatan kebutuhan sosial (*Social demand approach*), adalah pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Maksudnya, penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu pada tempat dan waktu tertentu. pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan (Usman, 2006:56).

Pendekatan kebutuhan sosial ini, harus memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan menganalisis hal-hal berikut : (1) pertumbuhan penduduk, (2) partisipasi dalam pendidikan dengan menghitung persentase penduduk yang bersekolah, (3) arus murid dari kelas satu ke kelas yang lebih tinggi dan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, (4) pilihan atau keinginan masyarakat dari individu tentang jenis-jenis pendidikan (Sarbini dan Lina, 2011:54).

1. Pendekatan ketenagakerjaan atau pendekatan kebutuhan tenaga kerja (*man power approach*) adalah pendekatan yang mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan (Sarbini dan Lina, 2011:55).

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka kurikulum dikembangkan sedemikian rupa sehingga lulusan yang merupakan keluaran (*output*) sistem pendidikan, siap pakai di lapangan. Implikasi dari pendekatan ini adalah pendidikan harus

diorientasikan kepada pekerjaan yang mungkin diperlukan di pasaran kerja. Pendidikan kejuruan dan teknologi baik pada

tingkat menengah maupun tingkat universitas merupakan prioritas (Sa’ud dan Makmun, 2011:240).

1. Pendekatan *cost effectiveness*, adalah pendekatan yang menitikberatkan pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Usman, 2006:59). Penyelenggaraan pendidikan diadakan jika benar-benar memberikan keuntungan baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta didik, baik keuntungan yang bersifat material maupun non material.

Pendekatan ini disebut juga pendekatan *cost benefit*/*rate of education*, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengukur pendidikan dari hasil atau keuntungan yang diperoleh. Jika suatu jenis pendidikan menghasilkan lulusan yang kalau bekerja menghasilkan produksi, jasa keuntungan yang jauh lebih besar dari input biaya yang dikeluarkan untuk jenis pendidikan tersebut, maka jenis pendidikan tersebut harus terus dikembangkan (Sarbini dan Lina, 2011:59).

Perencanaan pendidikan dalam sistem pengelolaan sekolah, terdiri

dari visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah (Permendiknas No. 19 Tahun 2007).

1. Visi sekolah

Visi sekolah merupakan representasi masa depan sekolah yang

diinginkan. Visi sebaiknya idealis tetapi masih dapat dicapai, singkat tetapi penuh makna, dan filosofis tetapi mudah dipahami (Barnawi dan Arifin, 2012:52). Artinya, visi adalah suatu kondisi ideal dari sebuah organisasi (sekolah) yang diharapkan dapat diwujudkan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, visi sekolah harus : (1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, (2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, (3) dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional, (4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah, (5) disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, (6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Menurut Barnawi dan Arifin (2012:54), visi sekolah sebagai cita-cita bersama tentu tidak hanya cukup ditetapkan bersama-sama, tetapi juga harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga sekolah.

1. Misi sekolah

Misi sekolah menunjukkan `apa yang dilakukan` atau `daftar dan karakteristik layanan yang diberikan` (Achmad Djunaidi, dalam Barnawi dan Arifin, 2012:54). Misi sekolah merepresentasikan *raison d’atre* atau alasan mendasar mengapa sebuah sekolah didirikan (Depdiknas dalam Barnawi dan Arifin, 2012:54). Maksudnya adalah semua tindakan atau kegiatan nyata yang akan dilakukan dalam rangka menciptakan suatu kondisi ideal di sekolah.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, misi sekolah : (1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, (2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, (3) menjadi dasar program pokok sekolah, (4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah, (5) membuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah, (6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat, (7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan, termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah, (8) disosialisaikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, (9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

1. Tujuan sekolah

Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai di masa yang akan datang dan digambarkan secara umum serta bersifat relatif tidak mengenal batas waktu. (Barnawi dan Arifin, 2012:56). Tujuan sekolah harus dirumuskan dalam kerangka visi dan misi pendidikan yang digambarkan secara umum dalam arti bahwa tujuan sekolah harus mencakup dimensi-dimensi kunci dan tidak dirumuskan untuk setiap unsur-unsur sekolah.

1. Rencana kerja sekolah

Rencana kerja sekolah adalah rencana kerja yang terdiri dari : (1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan, (2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah (Permendiknas No, 19 Tahun 2007).

Berdasarkan klasifikasi jenis-jenis perencanaan, baik dilihat dari segi waktu pelaksanaan maupun dari obyek yang direncanakan, dapat ditemukan persamaan dengan jenis-jenis rencana kerja sekolah untuk kemudian dapat digabungkan antara keduanya, yaitu : (1) perencanaan jangka pendek dari segi waktu sama dengan perencanaan rutin dari segi obyeknya. Jenis perencanaan seperti ini dalam rencana kerja sekolah diimplementasikan dalam bentuk rencana kerja tahunan (RKT) yang kemudian dirincikan dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), (2) perencanaan jangka menengah dan jangka panjang dapat disamakan dengan perencanaan pembangunan. Jenis perencanaan seperti ini dalam rencana kerja sekolah diimplementasikan dalam bentuk rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana pengembangan sekolah (RPS)

Rencana kerja tahunan atau rencana rutin sekolah, berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 harus memuat ketentuan yang jelas mengenai : (1) kesiswaan, (2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, (4) sarana dan prasarana, (5) keuangan dan pembiayaan, (6) budaya dan lingkungan sekolah, (7) peran serta masyarakat dan kemitraan, dan (8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

Rencana kerja sekolah ini, harus ditampilkan dengan :

1. Kemandirian

Konsep desentralisasi pendidikan telah mambuka ruang bagi terwujudnya otonomi manajemen sekolah sekaligus sebagai spirit desentaralisasi dan reformasi manajemen pendidikan sampai ke tingkat sekolah. Konsep otonomi telah memposisikan sekolah sebagai pembuat keputusan dan pelayanan manajemen persekolahan secara keseluruhan. Artinya, otonomi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk di dalamnya adalah kemandirian dalam membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan sekolah, namun tetap dalam koridor sistem pendidikan nasional (Danim, 2010:38).

1. Kemitraan

Sekolah pada dasarnya adalah sebuah industri, yaitu industri jasa yang menghasilkan produk berupa jasa kependidikan yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan (*customer*), baik pelanggan internal yaitu siswa maupun pelanggan eksternal yaitu masyarakat dan dunia industri (Fattah, 2012:2). Oleh karena itu, dalam perencanaannya, sekolah sebagai penyedia jasa harus membangun hubungan kerja sama dengan pihak pelanggan jasa.

1. Partisipasi

Artinya bahwa dalam pembuatan perencanaan hendaknya melibatkan berbagai pihak terkait (Usman, 2006:107). Dengan adanya partisipasi, sekolah akan memperoleh manfaat ganda, karena disamping rencana menjadi lebih baik, juga legalitas perencanaan tersebut bertambah kuat. Sekolah dalam menjalankan manajemennya, tentu membutuhkan dukungan dan

kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan.

Sekolah sebagai bagian dari masyarakat, keberadaannya sangat tergantung kepada keberadaan masyarakat sekitarnya. Oleh karena sekolah merupakan bagian dari masyarakat, maka keterlibatan atau pertisipasi masyarakat menjadi sangat penting, bukan hanya berkaitan dengan pendanaan, tetapi dalam segala aspeknya, termasuk perencanaannya (Atmodiwirio, 2000:35).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa : “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”. Selanjutnya pada Pasal 9 dinyatakan : “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat, baik orang tua siswa, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat secara umum diberi hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu konsekuensi dari partisipasi masyarakat untuk menghidupkan masyarakat demokrasi adalah pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan tenaga-tenaga yang berwenang dan profesional di dalamnya melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan, dan masyarakat dapat membantu penyelenggaraan serta mengontrol pelaksana-annya. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berarti pula pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta menentukan arah dan isi pendidikan. (Tilaar, 2010:22).

1. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal *budgeting* (*http:// id.wikipedia.org/wiki/Transparansi*). Perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut (Sa’ud dan Makmun, 2011:11). Oleh karena perencanaan itu berkaitan dengan anggaran biaya operasinal pelaksanaanya, maka yang dimaksud dengan transparansi atau keterbukaan adalah adanya sosialisasi rencana sekolah kepada seluruh warga sekolah, atau dengan kata lain bahwa perencanaan itu dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini untuk menjamin tercapainya pengelolaan perencanaan dan pengelolaan biaya secara transparan dan akuntabel.

1. Akuntabilitas

Pendidikan yang jauh dari tanggung jawab dan partisipasi

masyarakat akan menjadi pendidikan yang asing dari masyarakat karena tidak bisa memberikan jawaban terhadap kebudayaan nyata. Apabila partisipasi masyarakat dibutuhkan di dalam menentukan arah hidup bersama, maka pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang bermakna bagi kehidupan bersama. Semakin besar partisipasi masyarakat di dalam pendidikan, maka semakin tinggi pula akuntabilitas pendidikan tersebut, termasuk relevansi terhadap kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat. (Tilaar, 2010:*90*). Jadi, partisipasi dan relevensi terhadap kebutuhan masyarakat dalam perencanaan sekolah merupakan kunci tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Berkaitan dengan komponen-komponen rencana kerja sekolah, Rohiat (2012:21) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, sekolah memiliki berbagai macam bidang garapan, karena itu diperlukan keteraturan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidang garapan tersebut, yaitu : (1) kurikulum; (2) kesiswaan; (3) personil/anggota; (4) sarana dan prasarana; (5) keuangan; (6) hubungan sekolah dan masyarakat; dan (7) layanan khusus.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 53 Ayat 1, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Rencana kerja tahunan tersebut meliputi : (1) kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur, (b) jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya, (c) mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada, (d) penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya, (e) buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran, (f) jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran, (g) pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai, (h) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program, (i) jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, (j) rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun, (k) jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

Rencana kerja tersebut harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah. Rencana kerja tersebut dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait srta ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat (Permendiknas No, 19 Tahun 2007).

Menurut Ranupandojo (1996:22), salah satu ciri perencanaan yang baik adalah perencanaan tersebut harus selalu diperbaiki (diperbaharui) sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang memang selalu berubah.

1. **Kepala Sekolah Sebagai Manajer dan Pemimpin**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kriteria untuk diangkat sebagai kepala sekolah antara lain harus memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepala sekolah memiliki fungsi utama, yaitu fungsi sebagai manajer (pengelola) dan fungsi sebagai pemimpin di sekolahnya.

1. Fungsi Manajer

Kepala sekolah sebagai seorang manajer di sekolah dituntut memiliki kemampuan untuk memahami obyek yang akan dikelola dan bagaimana obyek itu dikelola, mampu mengidentifikasi dan merancang kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, mengkoordinasikan dan menggerakkan semua potensi dan sumber daya yang tersedia di sekolah, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas manajerialnya guna mencapai tujuan yang diharapkan, sebab, seorang kepala sekolah yang memanajemen sekolah tanpa pengetahuan manajemen pendidikan tidak akan bekerja secara efektif dan efisien, jauh dari mutu, dan keberhasilannya tidak akan meyakinkan. Pengetahuan dan atau teori tentang manajemen pendidikan sangat dibutuhkan dan harus dipahami oleh seorang kepala sekolah karena tanpa teori

manajemen seorang kepala sekolah akan melakukan pekerjaannya

dengan terkaan dan pendapatnya saja (Rohiat, 2012:15).

Memilki keterampilan manajerial bagi kepala sekolah adalah sebuah tuntutan, karena tanpa keterampilan tersebut, seorang kepala sekolah tidak akan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan justru akan menemui jalan buntu. Dia tidak akan dapat mengelola sekolah yang dipimpinnya mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang manajer, yaitu mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif, kepala sekolah dituntut memiliki tiga keterampilan manajerial, sebagaimana dikemukakan Wahjosumidjo (2003:10*1*) dan Amirullah dan Randyah Hanafi (2001:20-22), yaitu : (1) keterampilan konseptual (*conceptual skill*), (2) keterampilan manusiawi (*human skill*), dan (3) keterampilan teknis (*technical skill*).

Selain ketiga keterampilan di atas, Rohiat (2012:9) menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai seorang manajer juga dituntut memiliki keterampilan desain (*design skill*), namun keterampilan ini dalam pandangan Wahjosumidjo dan Amirullah dan Rindyah Hanafi sudah termasuk dalam keterampilan konseptual.

Selain itu, keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah adalah kemampuan menyusun perencanaan sekolah/madrasah, dan kemampuan ini merupakan salah satu kompetensi dari dimensi kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh kepala sekolah.

1. Fungsi pemimpin

Selain sebagai seorang manajer, kepala sekolah juga berfungsi sebagai seorang pemimpin di sekolahnya. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan memengaruhi para bawahannya. Memengaruhi dalam arti memberi pengaruh yang positif kepada para bawahannya, harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, sehingga membuat para bawahan antusias dan bersemangat untuk mengikuti atau menaati apa yang diinginkannya.

Kemampuan memengaruhi tersebut dapat berasal dari dalam

diri kepala sekolah (pengaruh pribadi) atau dari organisasi (pengaruh kedudukan atau jabatan) (Depdiknas, 2008:58). Pengaruh pribadi dan pengaruh jabatan ini harus dapat dimanfaatkan oleh seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal guna mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

Purwanto (2003:26) menyatakan bahwa :

“kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan orang yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa”.

Artinya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pemimpin tidak hanya berupa kemampuan yang berasal dari luar, dalam arti kemampuan yang dapat dipelajari saja, namun harus dilengkapi dengan potensi dari dalam dirinya ; kharisma, wibawa dan sifat-sifat kepribadian (adil, jujur, terpercaya, dan lain-lain), karena tanggung jawab kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, dalam sistem pengelolaan sekolah adalah bagaimana mencapai tujuan sekolah dengan dan melalui orang-orang yang dikelolanya.

Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola para bawahannya ini sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkannya, yaitu sekumpulan ciri dan pola menyeluruh dari perilaku, tindakan dan strategi yang diterapkan seorang pemimpin untuk memengaruhi bawahannya dalam mencapai tujuan (Sedamayanti, 2009:131).

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan merupakan jabatan yang sederhana, karena seorang kepala sekolah baik dalam fungsinya sebagai manajer maupun sebagai pemimpin dituntut untuk memilki beberapa kemampuan dan keterampilan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan maksimal. Kemampuan dan keterampilan mengelola dan memimpin adalah kunci keberhasilan

kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, kepekaan dalam membaca situasi dan kondisi para bawahan juga sangat dibutuhkan, sehingga kepala sekolah dapat menentukan gaya kepemimpinan yang tepat dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.

1. **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**

Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) didasarkan atas ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah. Pada BAB III Pasl 4 Ayat 1, disebutkan “Bentuk satuan pendidikn menengah terdiri atas : 1) sekolah menengah umum; 2) sekolah menengah kejuruan; 3) sekolah menengah keagamaan; 4) sekolah menengah kedinasan; 5) sekolah menengah luar biasa”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab VI Pasal 18 Ayat 3, berbunyi : “pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”. Sekolah menengah kejuruan berdasarkan tingkatan pendidikan setara dengan sekolah menengah atas, keduanya adalah jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

1. Tujuan

Pembelajaran di sekolah menengah kejuruan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa sekolah menengah kejuruan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Pasal 3:2, Secara khusus tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Hal ini berbeda dengan tujuan pendidikan menengah umum, yaitu mengutamakan penyiapan siswa

untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Dengan demikian, maka tujuan diselenggarakan sekolah

kejuruan adalah : (1) menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal di bidangnya, (2) menyiapkan  siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi, (3) menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif untuk dapat mengisi lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka mata pelajaran peminatan pada sekolah menengah kejuruan berupa mata pelajaran keahlian sebagai bekal untuk memasuki lapangan kerja.

1. Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, pemerintah melakukan penyesuaian sistem pendidikan dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kurikulum yang diterapkan di sekolah. contohnya Kurikulum Berbasi Kompetensi (KBK) pada tahun 2004 yang pada tahun 2006 disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan sekarang disempurnakan lagi menjadi Kurikulum 2013 (K.13).

Upaya penyempurnaan kurikulum di atas, bagi sekolah menengah kejuruan seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, oleh karena itu maka muatan kurikulum pada sekolah meneyngah kejuruan memiliki banyak program keahlian. Program keahlng dapat dipilih sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja, karena pendidikan kejuruan ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu. dengan demikian, maka peserta didik dapat memilih bidang keahlian yang diminati.

Disusunnya muatan kurikulum pada sekolah kejuruan sesuai

dengan kebutuhan dunia kerja, dimaksudkan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia kerja. Dengan demikian maka lulusan sekolah kejuruan diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni.

Kurikulum sekolah kejuruan dirancang dengan pandangan bahwa sekolah umum dan sekolah kejuruan pada dasarnya adalah pendidikan menengah, pembedanya hanya pada pengakomodasian minat peserta didik saat memasuki pendidikan menengah. Oleh karena itu, struktur umum sekolah kejuruan sama dengan struktur umum sekolah umum, yakni ada tiga kelompok mata pelajaran, yaitu : (1) kelompok mata pelajaran wajib A, (2) kelompok mata pelajaran wajib B, dan (3) kelompok mata pelajaran pilihan C atau disebut juga kelompok mata pelajaran peminatan. Kelompok mata pelajaran peminatan (C) pada SMK terdiri atas : kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian (C1), kelompok mata pelajaran dasar

program keahlian (C2), dan kelompok mata pelajaran paket keahlian (C3).

Sistem pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Pasal 80 menyatakan bahwa : (1) penjurusan pada sekolah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian, (2) setiap bidang keahlian dapat terdiri atas satu atau lebih program studi keahlian, (3) setiap program studi keahlian dapat terdiri atas satu atau lebih kompetensi keahlian.

Selain itu, proses kegiatan pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan terutama untuk mata pelajaran peminatan terdiri dari tiga bentuk kegiatan : (1) kegiatan tatap muka, yaitu pembelajaran teori yang dilaksanakan di dalam kelas, (2) kegiatan praktek yang dilaksanakan di sekolah, yaitu di dalam laboratorium atau bengkel, dan (3) kegiatan praktek kerja yang dilaksanakan di industri (prakerin), yaitu belajar bekerja sekaligus menimba pengalaman langsung di Industri. Konsep yang dikembangkan dalam proses kegiatan praktik kerja industri, dalam rangka mempersiapkan peserta didik mendapatkan pekerjaan profesional tertentu dilakukan melalui *“on the job training”*, yaitu belajar bekerja langsung di dunia kerja.

Kekhususan proses kegiatan pembelajaran pada sekolah

menengah kejuruan adalah adanya praktik kerja industri (prakerin), yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan langsung di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya setelah mendapatkan bekal ilmu-ilmu dasar di sekolah agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala meskipun kemungkinan besar dalam proses praktek kerja industri tersebut siswa akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di sekolah.

Tujuan diadakannya praktik kerja industri adalah : (1) mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah, (2) melatih siswa untuk berkomunikasi/berinteraksi secara profesional didunia kerja yang sebenarnya, (3) membentuk etos kerja yang baik bagi para siswa, (4) menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki sesuai bidang masing-masing, (5) menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan (6) menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri.

1. **Kerangka Berpikir**

Perencanaan pendidikan adalah proses berpikir secara cermat dan rasional dalam menyusun dan menetapkan tujuan-tujuan pendidikan serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada kurun waktu tertentu secara sistematis, efektif, dan efisien serta bagaimana mengontrol dan mengevaluasinya. Dengan demikian, maka di dalam perencanaan terdapat beberapa unsur, yaitu : (1) tujuan yang ingin dicapai, (2) kegiatan yang akan dilakukan, (3) jangka waktu tertentu, (4) cara-cara yang akan digunakan, (5) bagaimana mengukur keberhasilannya.

Selanjutnya, tujuan perencanaan dapat dikatakan sebagai : (1) jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, (2) pemberi pengarahan kepada administrator-administrator maupun non-administrator, (3) cara untuk menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang-tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas-aktivitas, (4) alat menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Oleh karena itu, maka setiap organisasi harus memiliki perencanaan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan, karena dengan adanya perencanaan maka : (1) pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah, (2) diperoleh gambaran tentang hal-hal yang akan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, (3) dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dengan memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik, (4) dapat ditentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan pentingnya tujuan dan kebutuhan organisasi, (5) dapat

dilakukan pengawasan dan pengukuran kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perencanaan adalah fungsi pengelolaan yang tidak boleh diabaikan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan, karena tanpa perencanaan, seseorang maupun sekelompok orang akan kehilangan arah dan semangat, bahkan justru akan melahirkan

kebingungan bagi para pelaku tindakan itu sendiri.

Dengan demikian, maka perencanaan pendidikan bagi para pengelola pendidikan dapat dikatakan sebagai peta atau penunjuk jalan yang akan memberikan tuntunan tentang arah yang akan dituju dan kenyataan apa yang diinginkan serta bagaimana cara mencapainya.

Berangkat dari uraian di atas, maka kerangka berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kualitas proses pendidikan

Kualitas pengelolaan pendidikan

Kualitas komponen pendidikan

perencanaan pendidikan

Bagaimanakah rumusan visi, misi dan tujuan sekolah, bagaimanakah rumusan rencana kerja sekolah dan bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pendidikan

Bagaimana para pengelola sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta memahami pentingnya perencanaan bagi keberlangsungan pendidikan yang dikelolanya

*Gambar 2.1. : Kerangka Berpikir*

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba memahami sebuah fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diteliti (Saroso, 2012:7).

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi pada SMK swasta dilihat dari aspek perencanan yang dilakukan oleh para pengelola sekolah, terutama kepala sekolah sebagai seorang manajer di sekolah, menyangkut rumusan visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah serta partisipasi masyarakat dalam perumusannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus, karena penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam mengenai masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2014:1). Hal ini juga sebagaimana yang dikatakan Herdiansyah (2012:76) mengenai studi kasus sebagai sebuah model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena dalam sebuah sistem yang terbatas (*bounded system*). Sistem yang tebatas artinya bahwa fenomena yang diteliti terjadi pada waktu yang tertentu dan pada tempat tertentu.

1. **Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur selama ± 2 bulan, terhitung sejak tanggal 26 Oktober sampai tanggal 31 Desember 2015. Alasan yang melatar belakangi dipilihnya Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat penelitian adalah karena kabupaten Lombok Timur memiliki sekolah yang sangat banyak. Menurut catatan peneliti, jumlah sekolah menengah (SMA/MA/SMK/MAK) pada tahun pelajaran 2015/2016, di Kabupaten Lombok Timur setidaknya terdapat 251 sekolah menengah dengan rincian : SMA sebanyak 52 sekolah (22 sekolah negeri dan 30 sekolah swasta), MA sebanyak 132 sekolah/madrasah (2 sekolah negeri dan 130 sekolah swasta), SMK sebanyak 65 sekolah (10 sekolah negeri negeri dan 55 sekolah swasta), dan MAK sebanyak 1 sekolah (swasta).

Sasaran penelitian ini adalah SMK swasta kecil (terdiri dari 3 – 6 kelas/rombongan belajar) yang dikelasifikasikan menjadi 3 kolompok, sebagai berikut :

1. SMK swasta kecil yang memiliki rata-rata jumlah siswa di bawah 20 orang perkelas.
2. SMK swasta kecil yang memiliki jumlah siswa antara 20 sampai dengan 32 orang perkelas.
3. SMK swasta kecil yang memiliki rata-rata jumlah siswa di atas 32 orang perkelas.

Alasan dipilihnya SMK swasta sebagai sasaran penelitian ini, karena peneliti melihat pertumbuhan jumlah SMK swasta yang begitu pesat di Kabupaten Lombok Timur, yang mencapai 55 sekolah hanya dalam waktu ± 10 tahun sejak berdirinya SMK swasta pertama yaitu SMK NW Pancor pada tahun 2005.

1. **Data dan Sumber Data**
2. **Data**

Sehubungan dengan data dalam penelitian kualitatif, Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari oang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Sahabuddin, 2003:29).

Data-data yang digali dan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data lisan, yaitu keterangan mengenai suatu gejala yang didapat melalui tutur kata dan data tertulis, yaitu keterangan mengenai suatu gejala yang didapat dari sumber tertulis (Riyanto, 2007:28-29), berupa kalimat, atau narasi dari subyek atau informan penelitian dan catatan-catatan dokumen yang diperoleh melalui teknik-teknik pengunpulan data tertentu, dianalisis, dan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan suatu temuan yang akan menjawab permasalahan penelitian.

1. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini disebut informan penelitian, adalah pihak atau individu yang memiliki keahlian atau pemahaman yang terbaik mengenai suatu hal yang ingin diketahui yang menjadi sumber data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subyek tertentu atau tentang orang lain, (Silalahi, 2009:312).

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala sekolah : 5 orang
2. Wakil Kepala Sekolah : 6 orang
3. Guru : 6 orang
4. Komite sekolah : 4 orang

sehingga jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 21 orang.

Para informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau kadang disebut *judgement sampling* adalah teknik penentuan siapa subyek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, 2009:272). Dipilihnya informan-informan sebagaimana disebutkan di atas adalah dengan pertimbangan bahwa mereka (para informan) tersebut diyakini sebagai pihak-pihak yang memiliki dan memahami informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh data sesuai fokus dan masalah penelitian maupun tujuan penelitian.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara (*interview*), studi dokumentasi. Penggunaan metode-metode tersebut dilakukan sesuai prosedur dan pedoman pengumpulan data.

1. **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara (bahasa Inggris : *interview*) adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mnengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2013:31). Kepercayaan (*trust*) adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah proses wawancara, karena kepercayaan sangat menentukan kesahihan informasi yang diberikan oleh terwawancara kepada

pewawancara.

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan [informasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi) yang rinci dan memahami sikap dan pandangan nara sumber (terwawancara) (Indrawan dan Yaniawati, 2014:136). di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.

Jadi, yang dimaksud dengan wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan informasi megenai pendapat, pengalaman, perasaan, motif, serta motivasi dari pihak-pihak yang diwawancarai, yang dilakukan secara lisan (melalui komunikasi langsung) melalui kegiatan tanya jawab untuk tujuan-tujuan tertentu.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara semi terstruktur, artinya bahwa dalam proses wawancara ini peneliti diberi kebebasan dalam mengajukan pertanyaan, tidak digunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan, pewawancara perlu menyiapkan topik dan contoh-contoh pertanyaan sebagai pemandu wawancara, meskipun dalam proses wawancara urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan wawancara, tergantung pada jalannya wawancara (Sarosa, 2012:47).

Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, wawancara dilakukan melalui tatap muka (*personal interview*) dengan informan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang akrab dan kedekatan antara peneliti dan informan, sehingga para informan dapat mengemukakan penjelasan-penjelasan yang rinci tentang rumusan perencanaan pendidikan yang ada di sekolah.

Wawancara yang dilakukan peneliti diawali dengan memberikan pemahaman kepada para informan penelitian tentang tujuan wawancara serta materi wawancara. Wawancara dilakukan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan berdasarkan *guidline* wawancara yang telah disiapkan. Wawancara diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus atau mendalam guna memperoleh informasi yang lebih rinci.

1. **Studi Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan

mencatat data-data yang sudah ada (Riyanto, 2007:91). Metode dokumentasi dalam pengumpulan data adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi seperti surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lain yang tersimpan (Indrawan dan Yaniawati, 2014:139).

Tujuan dijadikannya studi dokumentasi ini sebagai metode pengumpulan data adalah untuk pengumpulan data berupa catatan, surat, dan bukti-bukti tercatat lainnya yang terkait dengan perencanaan pendidikan di sekolah. Dokumen utama yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen perencanaan sekolah, seperti rencana kerja jangka menengah (RKJM), rencana kerja tahunan/jangka pendek (RKT), rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), dan dokumen-dokumen lain terkait dengan perencanaan sekolah. Sebelum melakukan pemeriksaan dan pengkajian derhadap dokumen-dokumen tersebut, terlebih dahulu peneliti meminta izin sekaligus menyakinkan kepala sekolah bahwa pemeriksaan dokumen yang dilakukan peneliti semata-mata hanya untuk keperluan penelitian.

1. **Teknik Analisis Data**

Kegiatan menganalisis data merupakan salah satu bagian kegiatan yang

harus dilewati dalam sebuah penelitian. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan gambaran yang jelas tentang data-data yang diperoleh selama diadakannya penelitian.

Sugiyono (2013:244) menyatakan bahwa :

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari haisl wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. (Silalahi, 2009:332).

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyusunan data untuk kemudian dikategorikan dan disajikan secara teratur dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, proses analisis data adalah proses menyusun data dan informasi yang diperoleh mengenai perencanaan pendidikan pada SMK swasta berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, kemudian mengelompokkannya berdasarkan topik-topik penelitian.

Data dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, kalimat, atau paragraf-paragraf mengenai pernyataan, peristiwa, maupun interaksi dan situasi yang terjadi. Berdasarkan wujud dan bentuk data tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu : (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) verifikasi data

atau penarikan kesimpulan.

1. **Reduksi Data**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok,

menfokuskan pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya (Indrawan dan Yaniawati, 2014:154). Kegiatan mereduksi data dapat dilakukan dengan cara (Riyanto, 2007:32) :

1. Membuat ringkasan kontak. Semuan data yang dikumpulkan dibaca dan dipahami untuk kemudian dituangkan dalam bentuk ringkasan.
2. Pengkodean kategori. Mengidentifikasi semua topik yang disajikan berdasarkan fokus penelitian dan selanjutnya dikodekan sesuai satuan topiknya.
3. Membuat catatan refleksi. Melakukan penggolongan dan editing terhadap data-data yang telah dikodekan untuk menentukan satuan-satuan data.
4. Pemilahan data. Proses pemberian kode yang sesuai terhadap satuan-satuan data yang diperoleh.

Data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiyono, 2013:247).

1. **Penyajian Data**

Penyajian data adalah proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik, dan grafik. Maksud dari penyajian data ini adalah agar data yang dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat (Riyanto, 2007:33).

Menurut Indarawan dan Yaniawati (2014:156), ada beberapa

konsep yang perlu diperhatikan, yaitu : deskripsi, tema, dan diskusi narasi.

1. Deskripsi adalah mengembangkan detail penting dari hasil analisis data dari berbagai sumber untuk membangun sebuah potret individu atau peristiwa.
2. Tema merupakan konseptualisasi fakta, data, dan informasi (tertulis, lisan, film, ataupun gambar) yang dikumpulkan dan dihimpun.
3. Diskusi narasi merupakan ringkasan detail kegiatan yang dilakukan peneliti saat berinteraksi dengan subyek penelitian. Dengan demikian, diskusi narasi : (1) memuat dialog dalam bentuk narasi narasumber; (2) menggunakan metafora dan analogi; dan (3) menggambarkan suasana batiniah.
4. **Penarikan Simpulan**

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktip atau deduktif. (Riyanto, 2007:34).

Penarikan simpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal pengumpulan data (simpulan sementara) dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, kecocokannya sebelum akhirnya sampai kepada simpulan final.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tahapan-tahapan dalam kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Silalahi, 2009:339).

1. **Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pengecekan dan pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam penelitian didasarkan pada kiteria-kriteria tertentu. hal ini dilakukan untuk menjamin keterpercayaan terhadap hasil penelitian. Kriteria-kriteria tersebut seperti yang dikemukakan Lincoln dan Guba (1985 dalam Riyanto, 2007:17-21) sebagai berikut :

1. **Kredibilitas**

Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik berikut :

1. Perpanjangan pengamatan, yaitu mengecek apakah data yang telah diberikan oleh para informan merupakan data yang sudah benar atau tidak. Pengecekan terhadap kebenaran data ini dilakukan peneliti dengan cara peneliti kembali ke lapangan, melakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah

ditemui maupun yang baru (Sugiyono, 2013:270).

1. Triangulasi atau dalam istilah Riyanto (2007:18) multiangulasi, adalah verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai

sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data.

Sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan kemite sekolah, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Cara pengecekan data atau informasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mencocokkan atau membandingkan data yang diperoleh dengan metode-metode tersebut terhadap masing-masing sumber data (Sugiyono, 2007:274).

1. Member Check, yaitu teknik pengecekan data atau informasi untuk memastikan apakah data atau informasi yang diperoleh peneliti sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data.

Pengecekan ini dilakukan peneliti dengan cara membacakan hasil wawancara kepada sumber data atau dengan memberikan hasil wawancara secara tertulis untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan dari sumber data (Riyanto, 2007:19).

Penggunaan teknik-teknik di atas, dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kepercayaan terhadap kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam penelitian ini.

1. **Transferabilitas**

Nilai transferabilitas dari hasil penelitian ini tidak dapat dijamin

oleh peneliti, karena nilai transferabilitas dari hasil penelitian ini akan sangat tergantung dari peniliaian pemakai atau pembaca, apakah hasil penelitian ini dapat ditransfer atau digeneralisasikan pada konteks dan

situasi lain (Riyanto, 2007:21).

Untuk memenuhi transferabilitas dari penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menguraikan data dan informasi yang diperoleh peneliti secara rinci dan sejelas mungkin, sehingga pemakai atau pembaca hasil penelitian ini dapat memutuskan apakah hasil penelitian ini dapat ditransfer atau digeneralisasikan pada konteks dan

situasi lain.

1. **Dependabilitas**

Dependabilitas adalah kriteria apakah proses penelitian bermutu atau tidak (Riyanto, 2007:20), karena mutu proses penelitian akan sangat mempengaruhi mutu hasil penelitian. Untuk menguji dependabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Auditor dalam penelitian ini adalah pembimbing I : Dr. Agus Ramdani, M.Sc. dan atau pembimbing II : Drs. Untung Waluyo, MA., Ph.D.

1. **Komfirmabilitas**

Komfirmabilitas adalah pengujian terhadap hasil penelitian, apakah hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian (Sugiyono, 2013:277). Dengan demikian, maka uji komfirmabilitas dan dependabilitas dapat dilakukan secara bersamaan dengan melakukan

penelusuran dan pelacakan catatan atau rekaman data lapangan.

Untuk uji komfimabilitas hasil penelitian, peneliti menemui para informan, melakukan pembicaraan sesuai topik wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, serta memberikan data-data hasil wawancara untuk mendapat tanggapan dari para informan.

­BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Latar Penelitian**

Kabupaten Lombok Timur merupakan satu dari sepuluh kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang berada di bagian timur Pulau Lombok. Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 kecamatan dan 254 desa/kelurahan dengan rincian : 15 kelurahan dan 239 desa dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa

- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

- Sebelah Barat : Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara

- Sebelah Timur : Selat Alas

Secara geografis, Kabupaten Lombok Timur terletak di antara 116° - 117° Bujur Timur dan antara 8° - 9° Lintang Selatan dengan luas wilayah 2.679,88 km2, yang terdiri atas dataran seluas 1.605,55 km2 (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09 persen) dengan populasi 1.123.488 jiwa (*RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 – 2018:II-1*).

Penelitian ini, difokuskan pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur. Menurut data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur, pada tahun pelajaran 2015/2016 terdapat 55 SMK yang tersebar di 16 kecamatan.

Sasaran penelitian ini adalah SMK swasta kecil, yaitu yang terdiri dari

3 – 6 kelas/rombongan belajar dengan lokasi penelitian sebagai berikut : (1) SMK Al-Ijtihad Masbagik; (2) SMK Darul Wustho Jerowaru; (3) SMK Maraqitta’limat Suela; (4) SMK Gunung Rinjani Lombok; (5) SMK Rahmatullah NW Jenggik; dan (6) SMK Kesehatan NW Teros. Pemilihan enam sekolah ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keterwakilan sasaran penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan rata-rata jumlah siswa perkelas, yaitu : (1) sekolah yang memiliki jumlah siswa di bawah 20 orang/kelas; (2) sekolah yang memiliki jumlah siswa antara 20 - 32 orang/kelas; dan (3) sekolah yang memiliki jumlah siswa di atas 32 orang/kelas. Sekolah-sekolah ini berlokasi di enam kecamatan yang berbeda, yaitu : (1) Kecamatan Masbagik; (2) Kecamatan Terara; (3) Kecamatan Suela; (4) Kecamatan Suralaga; (5) Kecamatan Jerowaru; dan (6) Kecamatan Labuhan Haji.

Untuk lebih jelasnya, gambaran dari masing-masing lokasi penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut :

* 1. SMK Al-Ijtihad Masbagik

SMK Al-Ijtihad Masbagik adalah salah satu dari lima SMK swasta yang ada di Kecamatan Masbagik. Sekolah ini berlokasi di jalan Lintas Laskar Nomor 45 Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

Sekolah ini didirikan pada tahun 2012 dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Al-Ijtihad Mahsuni Masbagik. Sekolah ini pertama kali menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2012/2013 setelah memperoleh Surat Izin Penerimaan Peserta Didik Baru dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor : 421.1/772.13/DIK.III/2012 tanggal 30 April 2012 dan pada tahun 2013 memperoleh Surat Izin Operasional dengan Nomor : 421.5/3161.4/DIK.III/2013 tanggal 1 Desember 2013.

Luas tanah untuk pembangunan SMK Al-Ijtihad Masbagik ± 1.500 m2 dan memiliki beberapa jenis ruangan, seperti tiga ruang belajar, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, dan perpustakaan, serta beberapa fasilitas lainnya.

Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini, SMK Al-Ijtihad Masbagik memiliki 33 orang siswa yang terbagi dalam tiga kelas/rombongan belajar atau rata-rata siswa/kelas 11 orang dengan rincian : kelas X = 7 orang, kelas XI = 12 orang, dan kelas XII = 14 orang. Bidang studi keahlian yang dikembangkan di sekolah ini adalah Kesehatan dengan program studi keahlian Keperawatan.

* 1. SMK Darul Wustho Jerowaru

SMK Darul Wustho Jerowaru didirikan pada tanggal 15 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Wustho Jerowaru Nomor 31/I/YP.DW/V/2008, berlokasi di Jalan TGH. Mutawalli Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

Sekolah ini pertama kali menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2008/2009. Pada tahun 2010, sekolah ini mendapat Surat Izin

Operasional dengan Nomor : 188.45/3318.8/DIK.III/2010 tanggal 22

Nopember 2010, dan pada tahun 2012 mendapat status terakreditasi C.

Sekolah ini memiliki luas tanah ± 6.000 m2 dengan rincian luas bangunan 270 m2, halaman 850 m2 dan tanah (kebun) 4.880 m2. SMK Darul Wustho Jerowaru memiliki tiga ruang belajar, satu ruang laboratorium, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, dan satu ruang tata usaha serta beberapa fasilitas lainnya.

Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini, SMK Darul Wustho Jerowaru memiliki 100 orang siswa yang terbagi dalam tiga kelas/rombongan belajar atau rata-rata siswa/kelas 33 orang dengan rincian : kelas X = 32 orang, kelas XI = 40 orang, dan kelas XII = 28 orang. Bidang studi keahlian yang dikembangkan di sekolah ini adalah Perikanan dan Kelautan dengan program studi keahlian Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya dan paket keahlian Budidaya Perikanan.

* 1. SMK Maraqitta’limat Suela

SMK Maraqitta`limat Suela adalah satu-satunya sekolah menengah kejuruan (SMK) yang terdapat di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Sekolah ini berlokasi di Jalan Wisata Lemor Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

Sekolah ini didirikan pada tanggal 2 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Maraqitta`limat Suela Nomor : 047/SK.PP/C-2/YMT/2009 dan mulai menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2009/2010 setelah memperoleh Surat Izin Penerimaan Peserta Didik Baru dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 425.1/1965/DIK.III/2009 tanggal 17 Juni 2009. Dua tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2011 sekolah ini memperoleh Surat Izin Operasional dengan Nomor : 421.1/3145/DIK.III/2011 tanggal 9 September 2011.

SMK Maraqitta’limat Suela dibangun di atas tanah seluas ± 500 m2, dan memiliki beberapa ruangan, diantaranya empat ruang belajar, satu ruang laboratorium IPA, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang tata usaha, serta beberapa fasilitas lainnya, sedangkan untuk praktik pertanian dilaksanakan di atas lahan seluas ± 10.000 m2 yang masih berstatus sewa.

Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini, SMK Maraqitta’limat Suela memiliki 111 orang siswa yang terbagi dalam empat kelas/rombongan belajar atau rata-rata siswa/kelas 28 orang dengan rincian : kelas X (dua kelas) = 56 orang, kelas XI = 25 orang, dan kelas XII = 30 orang. Bidang studi keahlian yang dikembangkan di sekolah ini adalah Agrobisnis dan Agroteknologi dengan program studi keahlian Agribisnis Produksi Tanaman dan dua paket keahlian untuk kelas X, yaitu Agribisnis Tanaman Perkebunan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, sedangkan untuk kelas XI dan XII adalah Agribisnis Tanaman Perkebunan.

* 1. SMK Gunung Rinjani Lombok

SMK Gunung Rinjani Lombok adalah sekolah menengah kejuruan

yang beralamat di Jalan Raya Mataram – Lb. Lombok KM. 50 Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Sekolah ini didirikan pada tanggal 14 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Lombok Nomor : 012/KPTS/ YPGRL/VI/2011 dan memperoleh Surat Izin Penerimaan Peserta Didik Baru Nomor : 421.1/772.11/DIK.III/2012 tanggal 30 April 2012 dan Surat Izin Operasional Nomor : 421.5/940/DIK.III/2013 tanggal 17 Juni 2013 dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur.

Sekolah ini dibangun di atas tanah seluas ± 10.000 m2 yang masih digunakan secara bersama dengan Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur. SMK Gunung Rinjani Lombok memiliki lima ruang belajar, dua ruang laboratorium komputer, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang tata usaha serta beberapa fasilitas lainnya.

Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini, SMK Gunung Rinjani Lombok memiliki 113 orang siswa yang terbagi dalam lima kelas/rombongan belajar atau rata-rata siswa/kelas 23 orang dengan rincian : kelas X (dua kelas) = 45 orang, kelas XI (dua kelas) = 45 orang, dan kelas XII = 23 orang. Bidang studi keahlian yang dikembangkan di sekolah ini adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika dan paket keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

* 1. SMK Rahmatullah NW Jenggik
1. SMK Rahmatullah NW Jenggik

SMK Rahmatullah NW Jenggik adalah satu dari tiga SMK swasta di Kecamatan Terara yang beralamat di Jalan Raya Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Sekolah ini didirikan pada tahun 2007 dan merupakan salah satu sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Rahmatullah NW Jenggik yang bernaung di bawah Yayasan Syekh Zainuddin NW Anjani. Pada tahun 2007, sekolah ini memperoleh Surat Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur, yang waktu itu masih bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor Surat : 188.45/2244.a/ PK.IV/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

Sekolah ini dibangun di atas tanah seluas ± 327 m2 dan memiliki bebrapa jenis ruangan, yaitu enam ruang belajar, satu ruang laboratorium komputer, satu ruang praktik sepeda motor, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, dan satu ruang tata usaha.

Pada tahun pelajaran 2015/2016, SMK Rahmatullah NW Jenggik memiliki 75 orang siswa yang terbagi dalam enam kelas/rombongan belajar atau rata-rata siswa/kelas 13 orang dengan rincian : kelas X (dua kelas) = 20 orang, kelas XI (dua kelas) = 20 orang, dan kelas XII (dua kelas) = 35 orang. Sekolah ini mengembangkan dua bidang studi keahlian, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Teknologi dan Rekayasa dengan program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika dan Teknik Otomotif, serta paket keahlian Teknik Komputer

dan Jaringan dan Teknik Sepeda Motor.

1. SMK Kesehatan NW Teros

SMK Kesehatan NW Teros adalah sekolah menengah kejuruan dengan status terakreditasi yang beralamat di Jalan Sandat No. 1 Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

Sekolah ini didirikan pada tanggal pada tanggal 21 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Perguruan NW Teros dan saat ini bernaung di bawah yayasan Fatmayodha Rinjani Teros. Sekolah ini pertama kali menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2007/2008 setelah mendapat Saurat Izin Peneriamaan Siswa Baru dengan Nomor 421.1/1046/PK.IV/2007 tanggal 26 Mei 2007. Pada tahun 2010, sekolah ini mendapat Surat Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor 118.45/956/DIK.III/2010 tanggal 8 Maret 2010.

Sekolah ini dibangun di atas tanah seluas ± 4.277 m2 dan memiliki beberapa ruangan, yaitu delapan ruang belajar, dua ruang laboratorium keperawatan, dua ruang laboratorium komputer, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang tata usaha, perpustakaan, mushalla, dan beberapa fasilitas lainnya.

Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini, SMK Kesehatan NW Teros memiliki 267 orang siswa yang terbagi dalam enam kelas/rombongan belajar atau rata-rata siswa/kelas 45 orang dengan rincian : kelas X (dua kelas) = 80 orang, kelas XI (dua kelas) = 88 orang, dan kelas XII = 99 orang. Bidang studi keahlian yang dikembangkan di sekolah ini adalah Kesehatan dengan program studi keahlian Keperawatan dan paket keahlian Keperawatan Kesehatan.

1. **Deskripsi Data Hasil Penelitian**

Data-data yang disajikan pada bagian ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui dua teknik pengumpulan data sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Pengumpulan data baik melalui teknik wawancara maupun studi dokumentasi, dilakukan peneliti sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan 31 Desember 2015.

Wawancara dengan para informan penelitian ini dilakukan secara terpisah dan bergiliran, baik di lokasi penelitian maupun di luar lokasi penelitian, seperti di rumah informan dan di tempat tugas pokok informan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar para informan tidak saling mempengaruhi dalam memberikan data kepada peneliti. Dengan demikian diharapkan kesahihan dan kebenaran data tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

Studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara memeriksa dan mengkaji dokumen-dokumen rencana kerja sekolah maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perencanaan yang dimiliki sekolah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti daftar hadir, buku notulen maupun arsip-arsip surat undangan rapat dan lain-lain. Untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut, peneliti meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan peneliti.

 Untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh, peneliti melakukan klarifikasi langsung kepada para informan dengan cara melakukan wawancara lagi guna memastikan apakah informasi yang telah diberikan para informan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak serta sudah sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Selain dengan wawancara lagi, peneliti juga memberikan transkrip hasil wawancara untuk mendapatkan tanggapan atau persetujuan tentang kesesuaian antara rekaman wawancara dan transkripnya. selanjutnya, peneliti juga mencocokkan dan membandingkan data-data hasil wawancara dengan para informan dengan data-data hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti.

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan studi dokumentasi tersebut dianalisis dengan cara melakukan reduksi data, yaitu dengan cara : membuat ringkasan kontak, memberikan kode, membuat catatan refleksi dan melakukan pemilahan data.

Untuk memudahkan pembaca memahami topik penelitian, sumber data serta lokasi penelitian, peneliti melakukan pengkodean kategori dengan cara sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. : Pengkodean Kategori

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kategori** | **Kode** |
| 1. | Topik Penelitian |  |
|  | 1. Rumusan visi, misi dan tujuan sekolah
 | VMT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kategori** | **Kode** |
|  | 1. Rumusan rencana kerja sekolah
 | RKS |
|  | 1. Partisipasi masyarakat
 | PM |
| 2. | Informan Penelitian |  |
|  | 1. Kepala sekolah
 | KS |
|  | 1. Wakil kepala sekolah
 | WKS |
|  | 1. Guru
 | G |
|  | 1. Komite sekolah
 | Kom. |
| 3. | Lokasi Penelitian |  |
|  | 1. SMK Al-Ijtihad Masbagik
 | 1 |
|  | 1. SMK Darul Wustho Jerowaru
 | 2 |
|  | 1. SMK Maraqitta’lim Suela
 | 3 |
|  | 1. SMK Gunung Rinjani Lombok
 | 4 |
|  | 1. SMK Rahmatullah NW Jenggik
 | 5 |
|  | 1. SMK Kesehatan NW Teros
 | 6 |

Selanjutnya, data-data yang telah direduksi tersebut akan dipaparkan dan didiskripsikan dalam dua bagian, yaitu : (1) data hasil wawancara; dan (2) data hasil studi dokumentasi.

1. **Data Hasil Wawancara**

Data hasil wawancara disajikan secara berurutan berdasarkan topik-topik penelitian sebagai berikut :

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Tujuan perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah dimaksudkan agar pengelola sekolah memiliki arah kebijakan dalam megelola kegiatan pembelajaran di sekolah dan sebagai landasan dalam perumusan rencana kerja sekolah. Dalam penelitian ini, data yang

penting untuk dipaparkan adalah :

1. Pentingnya visi, misi dan tujuan sekolah

Mengenai pentingnya setiap sekolah memiliki rumusan

visi, misi dan tujuan sekolah, para informan memiliki pendapat yang sama. Misalnya, KS.3 mengatakan “penting, karena itu adalah cita-cita sekolah” (KS.3.VMT. 3/11/15:17). Senada dengan KS.3, Kom.4 juga mengatakan “visi, misi dan tujuan sekolah itu merupakan cita-cita yang ingin dicapai sekolah” (Kom.4.VMT.17/11/15:36). Hal yang sama juga disampaikan KS.5 dengan mengatakan “sangat penting, sebab dengan adanya visi dan misi sekolah kita akan tahu arah kita mau kemana, jadi tanpa adanya visi dan misi sekolah, kita tidak akan tahu mau ke mana kita bawa sekolah ini” (KS.5.VMT. 28/11/15:39).

Dari hasil wawancara dengan para informan di atas, diperoleh data bahwa semua informan menyadari pentingnya sekolah memiliki visi, misi dan tujuan sekolah sebagai sebuah cita-cita bersama yang ingin dicapai dengan cara-cara yang sesuai dan dengan target yang jelas, sehingga akan terwujud sebuah kondisi yang ideal sebagai harapan bersama dari seluruh warga sekolah, meskipun hal itu dikemukakan dengan alasan yang berbeda-beda.

Namun demikian, kesadaran akan pentingya visi, misi dan tujuan sekolah ini tidak otomatis membuat para informan maupun warga sekolah lainnya memberi perhatian yang cukup terhadap visi, misi dan tujuan sekolah mereka. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan beberapa informan seputar pengetahuan dan perhatian mereka terhadap visi, misi dan tujuan sekolah. Misalnya, pengakuan WKS.2 ketika peneliti menanyakan apakah visi, misi dan tujuan sekolah diketahui oleh guru-guru, WKS.2 mengatakan kurang tahu ya, sepertinya sih jarang yang memperhatikan” (WKS.2.VMT.7/11/15:13). Selain itu G.5 mengaku pernah membaca visi, misi dan tujuan sekolahnya

hanya di dalam laptop.

Rendahnya tingkat perhatian warga sekolah terhadap visi, misi dan tujuan sekolah ini, disebabkan karena sosialisasi dan penjelasan mengenai visi. misi dan tujuan sekolah tidak pernah dilakukan dan hal ini diakui sendiri oleh beberapa kepala sekolah maupun informan lainnya.

1. Keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah

Mengenai keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah, sebagian besar informan mengaku bahwa sekolah mereka memiliki visi, misi dan tujuan sekolah. Hal ini seperti yang disampaikan KS.2 yang mengatakan “kita memiliki visi, misi dan tujuan sekolah” (KS.2.VMT.23/11/15:10). Selain itu, WKS.3 juga mengatakan “ada, dan itu kita tempel diluar” (WKS.3.VMT.3/11/15:18). Senada dengan WKS.3, Kom.3 mengatakan “visi sekolah itu ada, dipasang di depan” (Kom.3.VMT.3/11/15:23). Informan lain, seperti KS.4 juga mengaku memiliki rumusan visi, misi dan tujuan sekolah. Sambil menunjuk rumusan visi, misi sekolah yang terpasang di ruang guru KS.4 mengatakan “ya, ada. Ini visi, misi dan tujuan sekolah di sini” (KS.4.VMT.11/11/15:26). Demikian juga halnya dengan KS.5 yang mengaku memiliki visi, misi dan tujuan sekolah dengan mengatakan “visi misi sekolah kita juga punya, ada di dokumen-dokumen di sekolah” (KS.5.VMT. 28/11/15:39).

Berbeda dengan pengakuan para informan sebelumnya, KS.1 sambil menyebutkan visi sekolahnya mengatakan “visi sekolah ada” sedangkan untuk misi dan tujuan sekolah, KS.1 mengatakan “kalau misi dan tujuan sekolah kita, belum dirumuskan” (KS.1.VMT.28/10/15:2).

Dari informasi di atas, dapat dikatakan bahwa hampir semua sekolah lokasi penelitian ini telah memiliki visi, misi dan tujuan sekolah, meskipun masih belum mendapat perhatian dari seluruh warga sekolah maupun pihak-pihak berkepentingan.

1. Proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Mengenai proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, sebagian informan mengatakan bahwa proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan melalui rapat, baik antara kepala sekolah dengan guru atau antara kepala sekolah, guru dan komite sekolah. KS. 2 misalnya mengatakan bahwa visi, misi dan tujuan sekolah “dirumuskan oleh guru-guru dan kepala sekolah dalam rapat” (KS.2.VMT.23/11/15:10). Proses yang sama juga diungkapkan oleh KS.3 yang mengatakan “dirapatkan juga dengan guru-guru dan komite sekolah” (KS.3.VMT. 3/11/15:17). Senada dengan keduanya, WKS.4 mengatakan perumusan visi, misi dan tujuan sekolah dirumuskan oleh “kepala sekolah, beserta komite sekolah dan yayasan melalui rapat” (WKS.4.VMT.14/11/15:28). Demikian juga dengan pengakuan KS.5 yang mengatakan “kita rapat dan kita rumuskan bersama dengan guru-guru dan orang yang kita anggap paham masalah itu” (KS.5.VMT. 28/11/15:39). Hal yang sama juga diungkapkan oleh WKS.6 yang mengatakan bahwa visi, misi dan tujuan sekolah dirumuskan “melalui musyawarah kepala sekolah, komite, yayasan dan guru-guru” (WKS.6.VMT. 26/11/15:50).

 Namun demikian, berbeda dengan informan-informan di atas, sejumlah informan lain yang merupakan wakil kepala sekolah maupun guru, justru mengaku tidak mengetahui proses maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan visi, misi dan tujuan sekolah mereka. Misalnya, WKS.2 yang mengatakan “Kalau masalah itu saya tidak tahu, karena saya masuk di sekolah ini, visi, misi, dan tujuan sekolah itu sudah ada”, sedangkan mengenai pihak-pihak yang merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah, WKS.2 mengatakan “tidak tahu, saya tidak pernah dengar siapa yang merumuskan” (WKS.2.VMT. 7/11/15:13). Ketidaktahuan tentang proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan visi, misi dan tujuan sekolah juga diungkapkan oleh G.4 yang mengatakan “kalau masalah itu saya tidak tahu, bahkan siapa yang merumuskan juga tidak tahu, yang jelas visi, misi, dan tujuan sekolah itu ada” (G.4.VMT.11/11/15:34). Senada dengan keduanya, G.6 mengatakan “Saya tidak tahu siapa yang merumuskan, yang jelas ada” (G.6.VMT. 26/10/15:51).

Namun demikian, dari informasi yang diberikan para informan mengenai proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah di atas, dapat dikatakan bahwa hampir semua sekolah lokasi penelitian ini merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah melalui forum rapat. Meskipun beberapa informan mengaku tidak mengetahui proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan visi, misi dan tujuan sekolah mereka, namun hal ini disebabkan para informan tersebut mulai bergabung di sekolah tersebut setelah adanya rumusan visi, misi dan tujuan sekolah. sebagaimana yang disampaikan oleh WKS.2 di atas. Demikian juga dengan keterangan WKS.4 di atas, yang tidak menyebutkan guru sebagai pihak yang terlibat dalam perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, dengan alasan bahwa “waktu itu guru belum ada” (WKS.4.VMT.14/11/15:28).

1. Rencana Kerja Sekolah

Berkaitan dengan rencana kerja sekolah ini, data yang akan peneliti paparkan adalah :

1. Pentingnya perencanaan dalam pengelolaan sekolah

Untuk mendapatkan data mengenai pentingnya perencanaan atau rencana kerja sekolah bagi setiap sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sebuah organisasi pembelajaran, peneliti menanyakan pendapat para informan mengenai pentingnya setiap sekolah memiliki rencana kerja. Dalam wawancara dengan peneliti, semua informan mengemukakan pendapat yang sama, bahwa rencana kerja sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pengelolaan sekolah, meskipun dikemukakan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sebagaimana yang diungkapkan oleh KS.2 yang mengatakan “perencanaan itu sebagai dasar dalam pengelolaan pendidikan” (KS.2.RKS. 23/11/15:9), begitu juga dengan KS.3 yang mengatakan “perencanaan itu menjadi dasar kita nantinya dalam kegiatan-kegiatan sekolah” (KS.3.RKS. 3/11/15:16).

Sebagai komponen dasar dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, maka perencanaan atau rencana kerja sekolah tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya sebuah lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh KS.5 yang mengatakan “apapun yang akan kita lakukan tanpa ada rencana tidak mungkin akan sukses. Seperti kita mengajar, tanpa perencanaan atau RPP tidak mungkin bisa dijalankan sesuai dengan tujuan pembelajaran” (KS.5.RKS. 28/11/15:37). Senada dengan itu, G.5 mengatakan “untuk mencapai tujuan, harus ada rencana atau program-program” (G.5.RKS.28/11/15:40). Sama dengan kedua informan di atas, Kom.4 mengatakan “kalau sekolah itu tanpa perencanaan nanti arahnya menjadi tidak jelas” (Kom.4.RKS.17/11/15:32).

Hasil wawancara peneliti dengan para informan di atas, menunjukkan bahwa meskipun dalam memberi alasan pentingnya perencanaan para informan mengungkapkannya dengan berbagai alasan yang berbeda-beda, namun keterangan tersebut dapat menjadi bukti bahwa para informan menyadari betapa pentingnya perencanaan bagi setiap sekolah, sebagai pedoman dalam pengelolaan sekolah.

1. Keberadaan rencana kerja sekolah dandokumennya

Berkaitan dengan keberadaan rencana kerja sekolah dan

dokumennya, para informan memberikan informasi yang beragam. Sebagian informan mengaku memilki rencana kerja sekolah beserta dokumennya. Misalnya, ketika peneliti mengajukan pertanyaan tentang keberadaan rencana kerja sekolah beserta dokumennya, WKS.3 menjawab dengan mengatakan “rencana kerja sekolah ada, dan ada dokumennya” (WKS.3.RKS.3/11/15:18), senada dengan WKS.3, KS.4 mengatakan “rencana kerja kita punya dan ada dokumennya baik rencana kerja jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang” (KS.4.RKS.11/11/15:23), hal yang sama juga diungkapkan oleh KS.5 yang mengatakan “ya, kita punya rencana kerja, baik yang jangka menengah maupun yang jangka pendek, ada semua dokumennya” (KS.5.RKS.28/11/15:34), begitu juga WKS.6 yang mengatakan bahwa “sekolah memiliki perencanaan dan dokumennya ada” (WKS.6.RKS.26/10/15:49).

Berbeda dengan pengakuan para informan di atas, sejumlah informan lainnya mengaku memiliki perencanaan namun perencanaan tersebut tidak dituangkan dalam sebuah dokumen rencana kerja. Misalnya, KS.1 mengatakan “rencana kerja sekolah ada, pasti ada”. Tetapi ketika peneliti mengkonfirmasi keberadaan dokumen rencana kerja tersebut, KS.1 mengatakan “kalau rencana kerja sekolah dalam bentuk dokumen tidak ada” (KS.1.RKS.28/10/15:1). Sama halnya dengan KS.1, KS.2 mengatakan “kalau rencana jangka pendek sudah ada”, namun ketika peneliti menanyakan tentang keberadaan dokumen perencanaan tersebut, KS.2 mengatakan “kita belum memiliki dokumennya, masih kosong” (KS.2.RKS.23/11/15:9). Informan lain, yaitu WKS.2 juga mengatakan “rencananya sih banyak, misalnya mau bikin bisnis center, mau bikin kolam dan lain-lain”, namun mengenai keberadaan dokumen rencana-rencana tersebut, WKS.2 mengatakan “kalau dokumen perencanaan itu tidak ada, saya tidak pernah lihat” (WKS.2.RKS.7/11/15:11).

Informasi yang berbeda juga disampaikan sebagian informan lainnya. Mengenai keberadaan rencana kerja sekolah serta dokumennya, mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan rencana kerja sekolah mereka dan tidak pernah melihat dokumennya, dan hal ini diungkapkan oleh sebagian besar informan. Beberapa di antaranya, misalnya G.1 yang mengatakan “mungkin rencana kerjanya ada, saya kurang tahu, kalau dokumen rencana kerja sekolah tidak pernah saya lihat” (G.1.RKS.28/10/15:5). Hal yang sama juga disampaikan Kom.3 yang mengatakan “saya tidak begitu mengerti masalah-masalah yang seperti itu. Apakah sekolah punya atau tidak kita tidak tahu persis” (Kom.3.RKS. 3/11/15:23). Senada dengan keduanya, G.4 mengatakan “saya kira punya”, namun ketika ditanyakan tentang dokumennya, G.4 mengatakan “selama ini saya tidak pernah melihat dokumen perencanaan itu seperti apa. Apakah sudah dijilid atau diprint out, saya tidak pernah melihat” (G.4.RKS.11/11/15:31), begitu pula dengan G.5 yang mengatakan “kalau untuk perencanaan sekolah dan dokumennya saya kurang tahu, tidak pernah lihat dokumennya” (G.5.RKS.28/11/15:43).

Selain itu, dari beberapa informan yang mengaku tidak mengetahui secara pasti tentang rencana kerja sekolah beserta dokumennya tersebut, diperoleh informasi bahwa mereka pernah mengikuti rapat untuk membahas beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, namun dokumen tentang rencana-rencana kegiatan yang dibicarakan dalam rapat tersebut tidak diketahui keberadaannya. Misalnya G.3 yang mengatakan “pernah saya ikut membahas perencanaan tetapi tidak mendetil, hanya perencanaan secara umum saja, tapi kalau dokumennya sendiri saya tidak tahu” (G.3.RKS.4/11/15:20). Sama seperti G.3, G.5 mengatakan “ya pernah, kalau masalah rencana sering dibahas, program-programnya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu sering dibahas”, namun mengenai dokumen rencana kerja sekolah, G.5 mengatakan “ dokumennya saya kurang tahu, tidak pernah lihat dukumennya” (G.5.RKS. 28/11/15:43).

Beragamnya informasi yang diberikan para informan terkait keberadaan rencana kerja sekolah beserta dokumennya ini, mengindikasikan bahwa para pengelola sekolah belum sepenuhnya menjadikan dokumen rencana kerja sekolah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah secara transparan. Selain itu, para pengelola sekolah juga belum menyadari fungsi dokumen rencana kerja sekolah sebagai alat kontrol bagi seluruh warga sekolah dan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah.

1. Dasar perumusan rencana kerja sekolah

Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja sekolah, peneliti tidak bisa menggali informasi dari para informan yang mengaku tidak memiliki rencana kerja sekolah ataupun dari informan yang tidak mengetahui keberadaan rencana kerja sekolah mereka. Namun demikian, dari para informan yang mengaku memiliki rencana kerja sekolah beserta dokumennya, peneliti memperoleh informasi bahwa rencana kerja sekolah mereka dirumuskan berdasarkan usulan-usulan yang disampaikan oleh para guru, komite sekolah dan juga masyarakat. Misalnya penjelasan yang disampaikan KS.3 yang mengatakan “dasarnya adalah usulan-usulan dari para guru dan kondisi sekolah” (KS.3.RKS. 3/11/15:16). senada dengan KS.3, KS.5 mengatakan “dasarnya adalah usulan-usulan dan masukan-masukan dari luar, maksudnya dari luar adalah dari masyarakat, jadi tidak hanya dari guru saja” (KS.5.RKS.28/11/15:37).

Informasi lain yang diperoleh peneliti, rencana kerja sekolah dirumuskan atas dasar kebutuhan, baik kebutuhan sekolah maupun kebutuhan masayarakat. Hal ini, sebagaimana disampaikan oleh WKS.3 yang mengatakan bahwa rencana kerja sekolah disrumuskan “berdasarkan kebutuhan sekolah, misalnya kita mau bangun ruang belajar karena ruang belajar yang sudah ada masih kurang” (WKS.3.RKS.3/11/15:18). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kom.5 yang mengatakan “intinya, dasar perumusan rencana kerja sekolah adalah kebutuhan sekolah” (Kom.5.RKS.1/12/15:47). Namun demikian, para informan tidak menjelaskan bagaimana proses identifikasi terhadap kebutuhan sekolah maupun kebutuhan masyarakat yang mereka maksudkan. Analisis terhadap kebutuhan, keadaan dan kondisi sekolah yang sedang dihadapi maupun keadaan dan kondisi yang diharapkan, baik memalui analisis SWOT maupun melalui evaluasi diri skolah, tidak terungkap dalam wawancara peneliti dengan para informan.

Selain informasi di atas, diperoleh juga informasi lain bahwa rencana kerja sekolah dirumuskan berdasarkan hasil analisis dokumen rencana kerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh KS.4 yang mengatakan “dasarnya, selain hasil studi dokumen rencana kerja sebelumnya, tentu ada peraturan peraturan seperti peraturan menteri pendidikan” (KS.4.RKS. 11/11/15:25). Senada dengan itu, WKS.6 mengatakan “kita pasti memiliki dasar dalam menyusun rencana kerja, yaitu hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, juga masukan dari yayasan, komite, ketua jurusan dan waka-waka” (WKS.6.RKS. 26/10/15:49).

Beragamnya informasi yang disampaikan para informan di atas, serta adanya perbedaan dasar dalam perumusan rencana kerja sekolah yang disebutkan para informan meskipun mereka berasal dari sekolah yang sama, menujukkan ketidakjelasan faktor-faktor yang menjadi dasar perumusan rencana kerja sekolah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dalam proses perumusan rencana kerja sekolah tidak diawali dengan adanya rancangan atau konsep rencana kerja dari kepala sekolah, sehingga lebih cenderung didasarkan pada usulan dan masukan-masukan yang disampaikan para guru maupun komite sekolah pada saat rapat bersama kepala sekolah.

1. Komponen rencana kerja sekolah

Berkaitan dengan komponen-komponen yang terdapat dalam rencana kerja sekolah, peneliti hanya memfokuskan penggalian data dari para informan yang mengaku memiliki rencana kerja sekolah beserta dokumennya. Namun untuk memperoleh informasi yang utuh tentang komponen-komponen yang termuat dalam rencana kerja sekolah, peneliti harus mengajukan beberapa pertanyaan lebih mendalam kepada para informan. Hal ini disebabkan para informan tidak langsung memberikan informasi lengkap tentang komponen-komponen perencanaan yang terdapat dalam dokumen rencana kerja sekolah mereka. Misalnya, KS.3 yang awalnya hanya menyebutkan tiga komponen dengan mengatakan “ada masalah kesiswaan, sarana prasarana, pembelajaran dan lain-lain”. Namun ketika peneliti mengajukan pertanyaan masalah anggaran, KS.3 mengatakan “ya ada”. Kemudian peneliti menanyakan komponen perencanaan lainnya, seperti ada tidaknya rencana kerjasama dengan pihak-pihak terkait, KS.3 mengatakan “ya, kita menjalin kerjasama dengan kebon raya yang ada di sini” (KS.3.RKS.3/11/15:16).

Sama dengan KS.3 di atas, KS.5 juga tidak langsung memberikan informasi yang lengkap tentang komponen-komponen perencanaan yang termuat dalam rencana kerja sekolahnya, bahkan KS.5 awalnya hanya menyebutkan satu komponen saja, yaitu perencanaan tentang anggaran. KS.5 mengatakan “yang termuat di dalamnya terutama sekali masalah pembiayaan, sebab tanpa biaya tidak mungkin akan bisa jalan”, bahkan ketika peneliti menanyakan mengenai komponen lainnya, KS.5 kembali menegaskan dengan mengatakan “untuk sementara ini, itu saja yang kami lakukan, masalah pembiayaan saja”. Namun ketika peneliti mengajukan pertanyaan apakah tidak ada perencanaan yang berkaitan dengan kurikulum, KS.5 mengatakan “ya betul, masalah kurikulum kita susun bersama dan ada pakar yang khusus kita ambil dari teman SMK yaitu kepala SMKN Pringgabaya”. Terkait pertanyaan di seputar perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan, KS.5 menjelaskan dengan mengatakan “sementara tidak ada perencanaan seperti itu....oh, ya ada perencanaan itu merekrut tenaga sebab kita di swasta bahkan di negeri saja kesulitan dia terutama masalah guru mata pelajaran produktif. Jadi selalu kita merencanakan untuk mencarikan guru mata pelajaran produktif itu”. Selain itu, peneliti juga menanyakan ada atau tidaknya perencanaan masalah sarana dan prasarana, KS.5 mengatakan “untuk sarana prasarana, kita sudah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk bantuan peralatan dan laboratorium komputer”. Peneliti juga menanyakan tentang masalah kerjasama dengan pihak-pihak lain terutama untuk pelaksanaan PSG yang dijawab KS.5 dengan mengatakan “kalau PSG untuk TSMnya dilaksanakan di bengkel-bengkel terdekat” (KS.5.RKS.28/11/15:38).

Tidak jauh berbeda dengan dua informan sebelumnya, WKS.6 menyebutkan komponen-komponen yang termuat di dalam rencana kerja sekolahnya adalah perencanaan tentang kesiswaan, kurikulum, sarana dan prasarana, anggaran, tenaga pendidik, dan kerjasama. Namun Informasi ini juga diperoleh peneliti melalui beberapa pertanyaan. Ketika peneliti menanyakan komponen-komponen apa saja yang termuat dalam rencana kerja sekolah, WKS.6 hanya menyebutkan dua komponen dengan mengatakan “komponen yang pertama adalah perencanaan penerimaan siswa baru, perencanaan tentang kegiatan belajar mengajar dan ekstra kurikuler”. Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan perencanaan tentang sarana dan prasarana, WKS.6 mengatakan “ya, termasuk itu juga ada. Ada juga tentang anggaran”. Kemudian ketika peneliti menanyakan perencanaan tentang pendidik dan tenaga kependidikan, WKS.6 menjawab dengan mengatakan “di sana paling tentang pengangkatan guru kalau ada perubahan jumlah kelas”. Selain itu, peneliti juga menanyakan apakah rencana kerjasama sekolah dengan pihak-pihak lain termuat juga dalam perencanaan sekolah, WKS.6 mengatakan “ya, yang pertama kerjasama dengan RSUD Selong, RSUD Praya, Dinas Kesehatan Lombok Timur dan semua puskesmas yang ada di Lombok Timur... (WKS.6.RKS. 26/11/15:49). Begitu juga halnya dengan

informan lain, seperti KS.4 dan WKS.3.

Dibutuhkannya pertanyaan-pertanyaan pancingan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang komponen-komponen yang termuat dalam rencana kerja sekolah di atas, menunjukkan bahwa para informan dalam penelitian ini belum sepenuhnya mengetahui dan memahami komponen-komponen yang termuat dalam rencana kerja sekolah yang mereka miliki.

Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan para informan dan untuk mengetahui secara pasti komponen-komponen yang termuat dalam rencana kerja sekolah ini, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen rencana kerja sekolah yang telah disebutkan oleh para informan.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pendidikan

Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai keterlibatan masyarakat, baik komite sekolah, dunia usaha/industri maupun tokoh masyarakat setempat dalam perumusan rencana kerja sekolah, para informan memberikan informasi yang beragam, sebagian informan mengaku tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan rencana sekolah. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh KS.1 yang mengaku memiliki perencanaan sekolah meskipun rencana-rencana tersebut tidak dituangkan dalam bentuk dokumen rencana kerja sekolah. KS.1 mengatakan “untuk saat ini belum ada. Masyarakat maupun komite belum pernah kita libatkan” (KS.1.PM.28/10/15:2). Informasi ini dibenarkan oleh Kom.1 yang mengatakan “setelah pembentukan komite, sampai sekarang tidak pernah ada rapat” (Kom.1.PM.28/11/15:7). Senada dengan informan di atas, ketika peneliti menanyakan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan rencana kerja sekolah, G.4 mengatakan “yang terlibat dalam perumusan perencanaan sekolah adalah kepala sekolah dan teman-teman guru saja”, kemudian ketika peneliti menanyakan tentang partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah, G.4 mengatakan “selama ini memang pihak komite dan yayasan tidak pernah terlibat. Bahkan dalam semua perencanaan-perencanaan itu, kecuali mungkin yang berkaitan dengan pembangunan” (G.4.PM.11/11/15:31-34), dan hal ini diperkuat oleh pernyataan WKS.4 yang menyatakan tidak pernah melihat komite sekolah mengikuti pertemuan atau rapat dengan pihak sekolah. Hampir sama dengan G.4, G5 mengatakan “yang ikut rapat kepala sekolah denga guru-guru saja, kalau komite sekolah sewaktu-waktu dia ikut juga rapat (G.5.PM.28/11/15:43).

Berbeda dengan pernyataan para informan di atas, sebagian informan lainnya justru mengakui adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan rencana sekolah. Hal ini seperti disampaikan KS.3 yang mengatakan “selama ini kita selalu melibatkan pihak komite sekolah, kita undang dalam rapat terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik sekolah” (KS.3.PM.3/11/15:16). Senada dengan KS.3, Kom.3 menjelaskan “...sering kita diundang untuk rapat dengan kepala sekolah dan guru-guru” (Kom.3.PM.3/11/15:23). Namun sedikit berbeda dengan keduanya, G.3 mengatakan “...kalau rapat-rapat secara resmi, komite sekolah tidak selalu ikut (G.3.PM.4/11/15:21).

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah ini juga disampaikan oleh KS.4 yang mengatakan “kita mengundang *stakeholder* karena kita di sini punya yayasan, kita juga undang beberapa warga masyarakat sekitar, lalu pihak komite sekolah, dan DU/DI juga ada” (KS.4.PM.11/11/15:). Hal yang sama juga disampaikan oleh Kom.5 yang mengatakan “selain kepala sekolah dan komite sekolah, kita juga undang tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di sekitar sekolah” (Kom.5.PM.1/12/15:46).

Hal yang menarik dari hasil wawancara peneliti dengan para informan di atas adalah adanya perbedaan (kontradiksi) informasi yang disampaikan oleh informan meskipun berasal dari sekolah yang sama. Misalnya, informasi yang disampaikan oleh KS.4 dan G.4 di atas. Selain itu, terdapat pula perbedaan (inkonsistensi) informasi yang disampaikan informan ketika peneliti menanyakan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan rencana kerja sekolah dan ketika peneliti menanyakan tentang partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah. Misalnya ketika peneliti menanyakan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan rencana kerja sekolah, KS.5 mengatakan “kita selalu mengadakan rapat-rapat, bersama guru, dan pengurus komite” bahkan lebih lanjut KS.5 mengatakan “selain pengurus komite, kita juga undang tokoh masyarakat di luar pengurus komite di sekitar lingkungan sekolah” (KS.5.RKS.28/11/15:37), namun ketika peneliti menanyakan tentang partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah, KS.5 mengatakan “tidak setiap tahun, tapi kadang-kadang” (KS.5.PM.

28/11/15:39).

Namun demikian, dari informasi-informasi yang diberikan para informan tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses perumusan rencana kerja sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini masih tergolong rendah. Indikasi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari informasi sebagian besar informan yang mengaku tidak melibatkan masyarakat pada setiap perumusan rencana kerja sekolah mereka, maupun dari keterangan sebagian informan yang mengaku tidak pernah membahas rencana kerja sekolah bersama komite sekolah.

Selain itu, adanya kontradiksi maupun inkonsistensi informasi yang diberikan para informan di atas, juga dapat diartikan bahwa masih adanya fakta yang belum terungkap yang masih perlu digali lebih mendalam oleh peneliti. Oleh kerena itu, untuk menemukan fakta tersebut, peneliti perlu melakukan studi dokumentasi berkaitan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keterlibatan masayarakat dalam proses perumusan rencana kerja sekolah ini.

Selanjutnya, mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah yang dalam hal ini lebih banyak diwakili oleh komite sekolah, para informan mengatakan berupa usul dan saran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh KS.4 yang mengatakan “mereka memberikan saran-pendapat atau usul-saran tentang biaya, tentang guru dan lain-lain” (KS.4.PM.11/11/15:26). Senada dengan KS.4, KS.5 mengatakan “bentuk partisipasinya (masyarakat) berupa saran dan masukan-masukan” (KS.5.PM. 28/11/15:39).

1. **Data Hasil Studi Dokumentasi**

Data hasil studi dokumentasi yang telah dikumpulkan peneliti, akan dipaparkan berdasarkan topik-topik penelitian sebagai berikut :

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan tentang keberadaan rumusan visi, misi dan tujuan sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian. Untuk mengetahui keberadaan rumusan visi, misi dan tujuan sekolah tersebut, peneliti tidak hanya melakukan pengecekan terhadap dokumen rencana kerja sekolah saja, tetapi juga memeriksa berbagai dokumen lain yang dimiliki sekolah, seperti dokumen kurikulum sekolah, proposal, brosur penerimaan siswa baru, maupun

banner yang terpasang di sekolah.

Hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dari enam sekolah lokasi penelitian ini, hanya satu sekolah yang belum/tidak memiliki rumusan visi dan misi sekolah, yaitu SMK.1. Meskipun dalam wawancara dengan peneliti, KS.1 mengatakan memiliki visi dan misi sekolah serta pernah dicantumkan dalam brosur penerimaan siswa baru, juga dalam SK pembagian tugas sebagaimana yang dikemukakan WKS.1, namun pada saat peneliti meminta dokumen yang memuat visi dan misi sekolah tersebut, KS.1 meralat dengan mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki visi dan misi sekolah karena visi dan misi sekolah yang pernah ditulis pada brosur penerimaan siswa baru maupun pada SK pembagian tugas guru hanya merupakan visi, misi sementara yang disusun sendiri oleh kepala sekolah. Sedangkan untuk tujuan sekolah, belum/tidak dimiliki oleh dua sekolah, yaitu SMK.1 dan SMK.5

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, akan dipaparkan secara berurutan mulai dari visi, misi kemudian tujuan sekolah, sebagai berikut :

1. Rumusan visi sekolah
2. Visi SMK.2 :

“Menjadikan SMK Darul Wustho sebagai lembaga

pendidikan yang unggul, berkualitas, menghasilkan lulusan/tamatan yang memiliki kompetensi keahlian di bidangnya, produktif dan mandiri berlandaskan IMTAQ sejalan perkembangan IPTEK”.

Catatan : rumsan visi ini terpasang di lobi sekolah dan terdapat dalam proposal bantuan perpustakaan tahun 2015.

1. Visi SMK.3 :

Rumusan 1 :

“Menjadikan SMK Maraqitta`limat Suela sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai keunggulan produk dan layanan jasa pada setiap kompetensi keahliannya sehingga menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bermoral, produktif, dan kompetitif dalam era globalisasi”.

Catatan : rumsan visi ini terpasang di ruang guru.

Rumusan 2 :

“Menciptakan insan beriman, berprestasi, mandiri, dan berakhlakul karimah”.

Catatan : rumsan visi ini terdapat dalam dokumen RKJM.

Rumusan 3 :

 “Menjadikan setiap kompetensi keahlian sebagai salah satu program yang mempunyai keunggulan produk”.

Catatan : rumusan visi ini terdapat pada brosur pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2015/2016.

1. Visi SMK.4 :

“Mencetak tenaga terampil menengah yang berkualitas, kreatif, disiplin, religius dan siap kerja”.

Catatan : rumsan visi ini terpasang di ruang guru, dokumen kurikulum tahun pelajaran 2012/2013 dan RKJM.

1. Visi SMK.5 :

Rumusan 1 :

“Mewujudkan profil tamatan yang terampil, religius,

inovatif, jujur dan tanggap serta berbudi pekerti dan berbudaya luhur agar dapat bersaing dalam pasar kerja tingkat menengah menyongsong era globalisasi dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya demi kemakmuran bangsa, agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan bathin”.

Catatan : rumsan visi ini terdapat dalam dokumen kurikulum sekolah tahun 2010/2011

Rumusan 2 :

“Terampil, religius, inovatif dan tanggap”.

Catatan : rumsan visi ini terdapat dalam dokumen RKJM.

Rumusan 3 :

“Cerdas, terampil, beriman dan bertaqwa”.

Catatan : rumsan visi ini terdapat dalam dokumen proposal permohonan dana pembangunan ruang kelas tahun 2009,

proposal dana rehab ruang kelas tahun 2015.

Rumusan 4 :

“Menghasilkan lulusan yang TAMPIL PRIMA, yaitu menghasilkan lulusan yang bertaqwa, terampil, produktif, inovatif, dan mandiri serta berakhlaq mulia dan berbudi pekerti yang luhur agar mampu bersaing dalam dunia global dan menjadi manusia indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera”.

Catatan : rumsan visi ini terdapat dalam dokumen proposal permohonan pengadaan peralatan/revitalisasi SMK tahun 2011.

1. Visi SMK.6 :

Rumusan 1 :

“Menjadikan dan membentuk tamatan yang mampu sebagai

tenaga vocasional keperawatan secara medis dan non medis yang produktif, berkualitas, disiplin dalam keimanan dan keteqwaan”.

Catatan : rumsan visi ini tertulis dalam dokumen RKJM.

Rumusan 2 :

“Menjadikan SMK Kesehatan NW Teros sebagai lembaga pendidikan dan pembelajaran serta pelatihan di bidang keperawatan medis dan non medis yang siap kerja profesional dan mandiri dalam mewujudkan competence,

conscience, compassion”.

Catatan : rumsan visi ini tertulis dalam RKT 2014/2015 dan dokumen kurikulum sekolah tahun 2014/2015.

1. Rumusan misi sekolah
2. Misi SMK.2 :
	* 1. Menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama melalui pelaksanaan ibadah,
		2. Menumbuhkan kepatuhan, etika dalam pergaulan sesuai dengan norma yang berlaku,
		3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara epektif dan efisien sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya,
		4. Menumbuhkan semangat untuk berkompetisi, dan
		5. Menjalin hubungan/jaringan kerja dengan DU/DI baik

tingkat lokal, nasional dan internasional.

Catatan : rumsan misi ini terpasang di lobi sekolah dan terdapat dalam proposal bantuan perpustakaan tahun 2015.

1. Misi SMK.3 :

Rumusan 1 :

* 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan keimanan dan ketaqwaan yang membentuk manusia Indonesia seutuhnya, melaksanakan pembinaan secara berke-lanjutan untuk membentuk tamatan yang memiliki

kualitas moral dan disiplin yang tinggi,

* 1. Mengembangkan pola kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha/industri dan masyarakat untuk membentuk sikap profesionalisme,
	2. Mengembangkan kurikulum yang mengarah pada pola

pendidikan berbasis luas yang berorientasi life skill,

* 1. Mengembangkan pembelajaran berbasis produk dan menghasilkan produk-produk unggulan,
	2. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi terseleng-garanya kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan
	3. Meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki etos kerja, kreatif, inovatif, disiplin, bermoral dan bertanggungjawab dalam rangka

memberikan layanan kepada peserta didik

Catatan : rumsan misi ini terpasang di ruang guru.

Rumusan 2 :

1. menjalankan nilai-nilai agama dan berprilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari,
2. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, epektif dan menyenangkan untuk pengembangan potensi keilmuan dan hasil karya peserta didik,
3. Menumbuhkan semangat berprestasi dan mengembang-kan bakat dan minat peserta didik,
4. Melaksanakan program ekstrakurikuler untuk memasukkan siswa yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari,
5. Meningkatkan profesionalisme guru untuk menciptakan budaya mutu secara inovatif dan kreatif, dan
6. Menciptakan kenyamanan dan menyenangkan sebagai

wahana bersosialisasi warga sekolah dan masyarakat

sekitar.

Catatan : rumsan misi ini terdapat dalam dokumen RKJM.

1. Misi SMK.4 :
	1. Mementapkan karakter siswa menuju perilaku yang santun,
	2. Membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang

berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,

* 1. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan mengoperasi kan komputer dengan berbagai program,
	2. Meningkatkan keterampilan dalam bidang teknik komputer dan jaringan,
	3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana prasarana agar terbentuk kompetensi dasar yang kuat,
	4. Membangun jaringan dengan beberapa organisasi,

perusahaan sesuai dengan kompetensi lulusan.

Catatan : rumsan misi ini terpasang di ruang guru, dokumen kurikulum tahun pelajaran 2012/2013 dan RKJM.

1. Misi SMK.5 :

Rumusan 1 :

* 1. Menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa,
	2. Menyelenggarakan program pendidikan umum dan bidang kejuruan teknologi industri yang senantiasa berakar pada nilai budaya masyarakat, adat istiadat dan agama dengan tetap mengikuti perkembangan dunia luar,
	3. Meningkatkan prestasi dalam bidang ekstra kurikuler sesuai dengan potensi yang dimiliki SMK Rahmatullah NW Jenggik,
	4. Menyiapkan dan melatih tenaga terampil tingkat menengah dalam bidang teknologi dan industri,
	5. Menciptakan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan AFTA,
	6. Mengembangkan diri sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan industri yang terkemuka,
	7. Menjalin hubungan/jaringan kerja dengan DU/DI dan industri baik ditingkat lokal, nasional dan ASEAN,
	8. Mengembangkan diri sebagai pusat pendidikan mutu sekolah (life skill) kelompok teknologi dan industri yang diakui oleh masyarakat dan dunia usaha/industri baik secara regional maupun nasional,
	9. Melayani masyarakat untuk mendapatkan mutu sekolah (life skill) guna memasuki dunia kerja/berwiraswasta,
	10. Menjadi tempat pengembangan pendidikan kejuruan terpadu (TPKT) bidang teknologi terkemuka di Indonesia kawasan timur,
	11. Melayani siswa dan masyarakat yang berminat untuk mengikuti uji profesi/kompetensi tertentu, dan
	12. Meningkatkan mutu SMK Rahmatullah NW Jenggik sesuai dengan tuntutan nyata masyarakat, dunia kerja dan perkembangan IPTEK.

Catatan : rumusan misi ini terdapat dalam dokumen kurikulum sekolah tahun 2010/2011.

Rumusan 2 :

1. Menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa,
2. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan potensi dan prestasi akademik siswa,
3. Menciptakan dan melatih tenaga terampil di tingkat menengah dalam bidang teknologi dan industri,
4. Mengembangkan usaha untuk membudayakan kegiatan dalam rangka penciptaan akhlaq mulia bagi seluruh warga sekolah,
5. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama,
6. Menciptakan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat lokal, regional, dan
7. Mengembangkan diri sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan bidang teknologi dan industri yang terkemuka.

Catatan : rumsan misi ini terdapat dalam dokumen RKJM.

Rumusan 3 :

* 1. Cerdas emosional berdasarkan iman dan taqwa,
	2. Mengaktifkan proses pembelajaran dan bimbingan agar setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan
	3. Mengupayakan lulusan SMK untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

Catatan : rumsan misi ini terdapat dalam dokumen proposal permohonan dana pembangunan ruang kelas tahun 2009 dan proposal dana rehab ruang kelas thn 2015.

Rumusan 4 :

* 1. Menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa,
	2. Menciptakan dan melatih tenaga terampil di tingkat menengah dalam bidang teknologi dan industri, dan
	3. Mengembangkan diri sebagai pusat pendidikan kecakapan hidup (life skill) kelompok teknologi dan industri yang diakui oleh masyarakat dan dunia usaha/industri baik secara regional maupun nasional.

Catatan : rumsan misi ini terdapat dalam dokumen proposal

permohonan pengadaan peralatan/revitalisasi SMK tahun 2011.

1. Misi SMK.6 :

Rumusan 1 :

* 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk kelancaran PBM,
	2. Meningkatkan PBM dengan standar kelulusan 6,5,
	3. Mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler, dan
	4. Pendayagunaan laboratorium dan perpustakaan sekolah

Catatan : rumsan misi ini tertulis dalam dokumen RKJM.

Rumusan 2 :

* 1. mengembangkan keunggulan keterampilan dan ketelitian di bidang keperawatan medis dan non medis,
	2. Menerapkan kedisiplinan dan kejujuran yang dilandasi

oleh jiwa dan semangat keimanan dan ketaqwaan,

* 1. Mengembangkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran, dan
	2. Menghasilkan tamatan yang memenuhi harapan stakeholders.

Catatan : rumsan misi ini tertulis dalam RKT 2014/2015 dan dokumen kurikulum tahun 2014/2015.

1. Rumusan tujuan sekolah

Berbeda dengan keberadaan rumusan visi dan misi sekolah yang ditemukan peneliti pada lima sekolah lokasi penelitian, rumusan tujuan sekolah hanya ditemukan peneliti pada empat sekolah, sebagai berikut :

1. Tujuan sekolah SMK.2 :
	1. Mempersiapkan siswa yang berbudi pekerti luhur dan mampu melaksanakan agama dalam kehidupan sehari-hari,
	2. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi keahlian pilihannya.

Catatan : rumsan tujuan sekolah ini terdapat dalam proposal bantuan perpustakaan tahun 2015.

1. Tujuan sekolah SMK.3 :
	1. Mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada pada DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi keahlian,
	2. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesionalisme dalam kompetensi keahliannya,
	3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan
	4. Mempersiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.

Catatan : rumsan tujuan sekolah ini terpasang di ruang guru.

1. Tujuan sekolah SMK.4 :
	1. Mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada pada DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya,
	2. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya,
	3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Catatan : rumsan tujuan sekolah ini terdapat dalam

dokumen kurikulum tahun pelajaran 2012/2013.

1. Tujuan sekolah SMK.6 :

Rumusan 1 :

* 1. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja, mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha/dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah atau sebagai asisten dokter dan perawat bahkan bisa menjadi perawat gerontik, sesuai dengan kompetensi dalam perogram keahlian pilihannya,
	2. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profe-sional dalam bidang keahlian yang diminatinya, dan
	3. Membekali peserta didik dengan ilmu pegetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Catatan : rumsan tujuan sekolah ini terdapat dalam dokumen RKT 2014/2015.

Rumusan 2 :

1. Mempersiapkan peserta didik agar kreatif, inovatif, mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi,
2. Mewujudkan organisasi dan manajemen yang rapi,
3. Mewujudkan suasana kerja yang nyaman dan harmonis,
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan zaman,
5. Menciptakan lingkungan yang asri,
6. Mewujudkan unit produksi program keahlian,
7. Menjalin hubungan dengan DU/DI dan instansi setingkat.

Catatan : rumsan tujuan sekolah ini terdapat dalam dokumen kurikulum sekolah tahun 2014/2015.

Keberadaan dokumen dan rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang terdapat pada sekolah lokasi penelitian di atas dapat digambarkan dalam Tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2. : Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah beserta Nama Dokumennya

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Sekolah | Visi | Misi | Tujuan | Nama Dokumen |
| 1. | SMK Darul Wustho Jerowaru | 1 | 1 | - | Banner |
| 1 | 1 | 1 | proposal bantuan perpustakaan |
| 2. | SMK Maraqitta`limat Suela | 1 | 1 | 1 | Banner |
| 2 | 2 | - | Rencana Kerja Jangka Menengah |
| 3 | - | - | Brosur Siswa Baru |
| 3. | SMK Gunung Rinjani Lombok | 1 | 1 | - | Banner |
| 1 | 1 | 1 | Kurikulum Sekolah |
| 1 | 1 | - | RKJM |
| 4. | SMK Rahmatullah NW Jenggik | 1 | 1 | - | Kurikulum Sekolah |
| 2 | 2 | - | RKJM |
| 3 | 3 | - | Proposal Dana RKB |
| 3 | 3 | - | Proposal Dana Rehab |
| 4 | 4 | - | Proposal Dana Peralatan |
| 5. | SMK Kesehatan NW Teros | 1 | 1 | - | RKJM |
| 2 | 2 | 1 | RKT |
| 2 | 2 | 2 | Kurikulum Sekolah |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tiga dari lima sekolah lokasi penelitian ini memiliki lebih dari satu rumusan visi dan misi sekolah yang berbeda, bahkan memiliki sampai empat rumusan visi dan misi, sedangkan untuk tujuan sekolah, terdapat satu sekolah yang tidak memiliki rumusan tujuan sekolah, dan satu sekolah lainnya justru memiliki lebih dari satu rumusan tujuan sekolah.

Selain itu, peneliti juga mencatat bahwa visi, misi dan tujuan sekolah tersebut adalah visi, misi dan tujuan sekolah diberlakukan pada saat yang bersamaan, hal ini terlihat dari tahun pelajaran yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang memuat rumusan visi, misi dan tujuan sekolah tersebut.

Ketika peneliti mencoba melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah dengan menanyakan rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang merupakan hasil kesepakatan warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana keterangan sebagian informan yang menyebutkan bahwa perumusan visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan melalui rapat, pihak sekolah justru tidak bisa memberikan jawaban yang pasti dan mengaku lupa rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Selain itu, pihak sekolah juga tidak bisa menunjukkan dokumen rapat yang dimaksudkan dalam wawancara kepada peneliti.

Adanya beragam rumusan visi, misi dan tujuan sekolah pada beberapa sekolah lokasi penelitian dengan masa berlaku yang bersamaan ini mengindikasikan bahwa para pengelola sekolah tersebut belum memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah sebagai bagian penting dari fungsi perencanaan sekolah sehingga menimbulkan kesan bahwa

sekolah dikelola tanpa arah dan sasaran yang jelas.

1. Rencana Kerja Sekolah

Berkaitan dengan rencana kerja sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, data hasil studi dokumentasi yang akan peneliti paparkan adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan dokumen rencana kerja sekolah

Untuk memastikan keberadaan dokumen rencana kerja sekolah, peneliti memfokuskan pada sekolah-sekolah tempat tugas para informan yang mengatakan bahwa sekolah mereka memiliki dokumen rencana kerja sekolah.

Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, diperoleh data bahwa dari enam sekolah lokasi penelitian ini, hanya empat sekolah yang memiliki rencana kerja sekolah. Sekolah-sekolah tersebut adalah : SMK.3, SMK.4, SMK.5 dan SMK.6.

Meskipun empat sekolah tersebut dapat menunjukkan dokumen rencana kerja sekolah yang dimiliki, namun rencana kerja sekolah tersebut tidak lengkap sebagaimana yang menjadi tuntutan dalam standar pengelolaan sekolah. Di SMK.3, SMK.4, dan SMK.5, dokumen rencana kerja sekolah yang dapat ditunujukkan kepada peneliti adalah rencana kerja jangka menengah (RKJM), sedangkan rencana kerja tahunan (RKT) ataupun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS),

sekolah-sekolah ini tidak memilikinya.

Berbeda dengan ketiga sekolah di atas yang hanya memiliki satu jenis rencana kerja, dokumen rencana kerja sekolah yang dapat ditunjukkan kepada peneliti di SMK.6 adalah dokumen RKJM dan RKT, sedangkan untuk RKAS, sekolah ini juga tidak memilikinya.

Selain jenis-jenis rencana kerja yang dimiliki empat sekolah diatas, fakta lain yang diperoleh peneliti dari studi dokumentasi terhadap keberadaan rencana kerja sekolah ini adalah mengenai periode masa berlaku dari rencan-rencana kerja tersebut.

Di SMK.3, peneliti menemukan ketidakjelasan masa berlaku RKJM yang dimilki. Ketidakjelasan periode masa berlaku rencana kerja sekolah ini karena pada sampul depan (*cover*) dokumen rencana kerja tersebut tertulis “tahun pelajaran 2015/2016”, sedangkan pada bagian isi, yaitu pada tujuan yang ingin dicapai tertulis “tujuan yang ingin dicapai untuk rentang waktu dua tahun, yaitu untuk tahun pelajaran 2011/2012 dan 2012/2013”. Namun dari hasil klarifikasi peneliti dengan pihak sekolah, dikatakan bahwa RKJM tersebut adalah RKJM tahun pelajaran 2011/2012 sampai dengan tahun pelajaran 2014/2015. Sama dengan SMK.3, RKJM yang dimiliki oleh SMK.4 adalah RKJM tahun pelajaran 2011/2012 sampai dengan tahun pelajaran 2014/2015. Sedangkan RKJM yang dimiliki oleh SMK.5 RKJM yang sampul depan dan isinya berbeda. Pada sampul depan (*cover*) dokumen tersebut tertulis “rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2010/2011”, sedangkan pada bagian isi menunjukkan RKJM untuk tahun pelajaran 2010/2011 sampai dengan tahun pelajaran 2013/2014.

Berbeda dengan RKJM yang dimiliki ketiga sekolah di atas, RKJM yang dimiliki oleh SMK.6 adalah RKJM tahun pelajaran 2014/2015 sampai dengan tahun pelajaran 2017/2018, sedangkan dokumen RKTnya adalah RKT tahun pelajaran 2014/2015.

Untuk lebih jelasnya, tentang jenis dan periode masa berlaku dari rencana kerja yang dimiliki keempat sekolah di atas, dapat digambarkan dalam Tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3. : Dokumen rencana Kerja Sekolah berdasarkan jenis dan masa berlakunya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Sekolah** | **Jenis Rencana Kerja** | **Masa Berlaku (Tahun)** |
| SMK Maraqitta’limat Suela | Rencana Kerja Jangka Menengah | 2011/2012 s.d. 2014/2015 |
| SMK Gunung Rinjani | Rencana Kerja Jangka Menengah | 2011/2012 s.d. 2014/2015 |
| SMK Rahmatullah NW Jenggik | Rencana Kerja Jangka Menengah | 2010/2011 s.d. 2013/2014 |
| SMK Kesehatan NW Teros | Rencana Kerja Jangka Menengah | 2014/2015 s.d. 2017/2018 |
| Rencana Kerja Tahunan | 2014/2015 |

Dari Tabel 4.3. di atas, diperoleh data bahwa selain tidak lengkapnya jenis rencana kerja sekolah yang dimiliki oleh sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, juga diperoleh data bahwa rencana kerja yang dimiliki adalah rencana kerja yang sudah tidak berlaku karena m­asa berlakunya sudah lewat.

Selain itu, dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, peneliti juga menemukan adanya adanya dokumen rencana kerja sekolah yang terindikasi merupakan *copy-paste* dari dokumen rencana kerja sekolah lain, hal ini terlihat dengan masih adanya identitas/nama sekolah lain yang tertulis di dalamnya serta adanya kesamaan dari dokumen-dokumen rencana kerja tersebut.

1. Dasar perumusan rencana kerja sekolah

Mengenai dasar perumusan rencana kerja sekolah, peneliti melakukan studi dokumentasi berdasar hasil wawancara peneliti dengan para informan. Dalam dokumen rencana kerja sekolah yang dimiliki, peneliti tidak menemukan adanya faktor-faktor yang menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja sekolah tersebut secara jelas.

Ketika peneliti mencoba mengecek dokumen hasil analisis kebutuhan sebagaimana disampaikan para informan dalam wawancara, pihak sekolah tidak dapat menunjukkan, begitu juga dengan hasil analisis terhadap dokumen rencana kerja tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga halnya dengan dokumen-dokumen lain, seperti dokumen hasil evaluasi diri sekolah maupun dokumen hasil analisis SWOT, hingga akhir studi ini pihak sekolah tidak dapat menunjukkannya kepada peneliti.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa rencana kerja sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah lokasi penelitian ini dirumusukan tanpa dasar perumusan yang jelas.

1. Komponen-komponen rencana kerja sekolah

Hasil studi dokumentasi terhadap dokumen rencana kerja sekolah lama berkaitan dengan komponen-komponen yang termuat di dalamnya, menunjukkan bahwa tidak semua sekolah tersebut memiliki rencana kerja sekolah yang memuat komponen-komponen rencana kerja secara lengkap.

Tidak lengkapnya komponen rencana kerja yang dimiliki sekolah-sekolah ini, dapat dilihat misalnya di SMK.4, rencana kerja sekolah yang dimiliki hanya memuat satu komponen rencana kerja, yaitu komponen yang berkaitan dengan kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan rencana kerja sekolah yang dimiliki SMK.5 memuat komponen-komponen rencana kerja yang berkaitan dengan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.

Untuk lebih jelasnya mengenai komponen-komponen perencanaan yang terdapat dalam dokumen rencana kerja sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, dapat dipaparkan dalam Tabel 4.4. berikut :

Tabel 4.4. komponen-komponen rencana kerja sekolah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/Kode Sekolah** | **Komponen** |
| 1. | SMK.3  | 1. Kesiswaan
 |
| 1. Kurikulum
 |
| 1. Pendidik dan tenaga kependidikan
 |
| 1. Sarana dan prasarana
 |
| 2. | SMK.4  | 1. Kurikulum
 |
| 3. | SMK.5 | 1. Kurikulum
 |
| 1. Pendidik dan tenaga kependidikan
 |
| 1. Sarana dan prasarana
 |
| 4. | SMK.6  | 1. Kesiswaan
 |
| 1. Kurikulum
 |
| 1. Pendidik dan tenaga kependidikan
 |
| 1. Sarana dan prasarana
 |
| 1. Kemitraan
 |

Adapun mengenai uraian dari masing-masing komponen rencana kerja pada sekolah-sekolah di atas, peneliti menemukan bahwa rencana kerja yang dimiliki tersebut belum menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan secara konkrit, tetapi justru lebih tepat dikatakan sebagai target yang ingin dicapai.

Beberapa point dalam uraian komponen-komponen rencana kerja tersebut, misalnya :

1. Memiliki kalender pendidikan yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan.
2. Fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstrakurikuler peserta didik.
3. Guru mengajar sesuai dengan bidang dan jurusannya minimal 85 %.
4. Guru memiliki Akta IV minimal 85 %.
5. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pendidikan

Berkaitan dengan partisipasi atau keterlibatan masyarakat, baik atas nama komite sekolah, wali murid, tokoh masyarakat maupun pihak dunia usaha/industri dalam perumusan visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah, peneliti melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti partisipasi atau keterlibatan masyarakat tersebut.

Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, diperoleh data tidak adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam perumusan visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini. Ketika peneliti mencoba melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki, pihak sekolah tidak dapat menunjukkan kepada peneliti dokumen yang dapat dijadikan bukti keikutsertaan atau keterlibatan pihak-pihak yang telah disebutkan dalam wawancara, termasuk komite sekolah dan masyarakat dalam perumusan visi, misi dan tujuan sekolah maupun rencana kerja sekolah, baik berupa daftar hadir rapat maupun bukti-bukti lainnya, seperti arsip surat undangan maupun gambar atau foto kegiatan (rapat). Fakta ini terjadi pada semua sekolah lokasi penelitian ini.

Data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam perumusan visi, misi dan tujuan sekolah maupun rencana kerja sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini masih tergolong sangat rendah.

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan pembahasan tentang data-data yang diperoleh peneliti, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi untuk kemudian dipaparkan kesesuaian hubungannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan pada BAB II penelitian ini.

Pembahasan hasil penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah**

Pada bagian ini, beberapa hal yang akan dibahas peneliti adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah

Sebagaimana telah dipaparkan peneliti, hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa semua informan dalam penelitian ini memiliki pendapat yang sama mengenai pentingnya setiap sekolah memiliki visi, misi dan tujuan sekolah. Dalam sistem pengelolaan sekolah, setiap kegiatan yang dilakukan harus diarahkan pada satu target dan tujuan yang sama sehingga apa yang menjadi harapan bersama dapat diwujudkan.

Namun demikian, berdasarkan data hasil studi dokumentasi, data yang diperoleh peneliti justru menunjukkan fakta yang berbeda, bahwa keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah ini belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, termasuk dalam merumuskan rencana kerja sekolah.

Hal ini dapat dilihat dari adanya sekolah-sekolah lokasi penelitian ini yang memiliki rumusan visi, misi dan tujuan yang hampir sama, bahkan peneliti juga menemukan adanya sekolah-sekolah yang memiliki lebih dari satu rumusan visi, misi maupun tujuan sekolah yang diberlakukan pada saat yang bersamaan.

Beragamnya visi, misi dan tujuan sekolah sekolah yang diberlakukan pada saat yang bersamaan ini merupakan indikasi kuat bahwa keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah ini sesungguhnya belum disadari sepenuhnya sebagai bagian penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Visi, misi dan tujuan sekolah yang dikembangkan pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini bukan merupakan visi, misi dan tujuan sekolah yang menjadi cita-cita bersama dan dirumuskan bersama berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, melainkan visi, misi dan tujuan pribadi yang dirumuskan oleh individu-individu yang ada di sekolah-sekolah tersebut.

Tidak dijadikannya visi, misi dan tujuan sekolah sebagai acuan dan pedoman pokok dalam pengelolaan sekolah, tentu dapat berakibat tidak jelasnya arah dan sasaran yang sesungguhnya ingin dicapai dari seluruh rangkaian aktivitas pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Ketidakjelasan arah dan sasaran yang sesungguhnya ingin dicapai sekolah tentu akan berakibat pula pada alternatif dan perioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, bahwa visi sekolah harus dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.

Selain itu, pengakuan para informan mengenai pentingnya visi, misi dan tujuan sekolah ternyata tidak dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah terhadap visi, misi dan tujuan sekolahnya. Data yang diperoleh peneliti juga menunjukkan bahwa tingkat perhatian warga sekolah terhadap visi, misi dan tujuan sekolah juga masih sangat rendah, dan hal ini tidak sesuai dengan pendapat Barnawi dan Arifin (2012:54) yang mengatakan bahwa visi sekolah sebagai cita-cita bersama tentu tidak hanya cukup ditetapkan bersama-sama, tetapi juga harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga sekolah.

Ketidaktahuan dan kekurangpahaman warga sekolah tersebut, disebabkan karena beberapa faktor, seperti : (1) sosialisasi tentang keberadaan maupun makna dan fungsi visi, misi dan tujuan sekolah tidak pernah dilakukan, padahal dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dikatakan bahwa visi, misi sekolah harus disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, (2) rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang terlalu panjang, sulit diukur, dan sulit dijangkau. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan Barnawi dan Arifin (2012:52) bahwa visi sebaiknya idealis tetapi masih dapat dicapai, singkat tetapi penuh makna, dan filosofis tetapi mudah dipahami, (3) beragamnya rumusan visi, misi dan tujuan yang diberlakukan sekolah pada waktu yang bersamaan. Rumusan visi, misi dan tujuan sekolah terkesan hanya sebagai formalitas yang sifatnya sekedar “asal ada”.

1. Proses Perumusan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Dalam proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, hampir semua informan yang mengetahui proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah ini mengatakan bahwa perumusan visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan melaui rapat bersama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah dan pihak yayasan. Namun yang menarik adalah adanya *kontradiksi* informasi yang disampaikan informan, misalnya yang mengatakan bahwa visi, misi dan tujuan sekolahnya dirumuskan melalui rapat dengan guru-guru dan komite sekolah, padahal pada bagian lain informan tersebut mengatakan tidak mengetahui kapan visi, misi dan tujuan sekolahnya dirumuskan dengan alasan bahwa informan tersebut adalah orang yang baru ditugaskan sekitar satu tahun di sekolahnya. Sementara itu, informan lain yang berasal dari sekolah yang sama mengatakan bahwa visi, misi dan tujuan sekolahnya baru dirumuskan sekitar enam bulan, yaitu pada awal tahun pembelajaran.

Selain itu, dari fakta-fakta yang terungkap melalui studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang dimiliki hampir semua sekolah lokasi penelitian ini bukan merupakan hasil rumusan bersama, terbukti dengan adanya sekolah-sekolah yang memiliki beberapa rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang berbeda dan berlaku pada pada saat bersamaan. Disamping fakta-fakta di atas, selama peneliti melakukan studi dokumentasi, pihak sekolah juga tidak bisa menunjukkan adanya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya pertemuan atau rapat membahas rumusan visi, misi dan tujuan sekolah sebagaimana pengakuan para informan.

Tidak adanya proses pembahasan dan perumusan visi, misi dan tujuan sekolah secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mempengaruhi fokus tindakan, tingkat kerjasama dan rasa tanggung jawab seluruh warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai apa yang diharapkan. Dengan demikian maka rumusan visi sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai cerminan cita-cita bersama seluruh warga sekolah beserta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah ini, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai representasi masa depan sekolah yang diinginkan. (Barnawi dan Arifin, 2012:52).

1. **Rencana Kerja Sekolah**

Berkaitan dengan rencana kerja sekolah, beberapa hal yang akan dibahas peneliti pada bagian ini adalah :

1. Pentingnya perencanaan dalam pengelolaan sekolah

Perencanaan merupakan fungsi pengelolaan yang keberadaannya terbukti dapat meningkatkan kualitas aktivitas layanan atau kegiatan dan hasil pendidikan secara maksimal, baik menyangkut aspek akademik maupun non akademiknya.

Data hasil penelitian, sebagaimana telah dipaparkan peneliti menunjukkan bahwa semua informan dalam penelitian ini menyadari betul betapa pentingnya posisi dan peran rencana kerja sekolah sebagai bagian dari sistem pengelolaan pendidikan. Oleh karena pentingnya posisi dan peran rencana kerja sekolah tersebut, maka rencana kerja sekolah tentu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap sekolah. Hal ini tergambar dari berbagai

alasan yang dikemukakan para informan.

Kesadaran akan pentingnya posisi dan peran perencanaan sebagaimana diungkapkan para informan ini sejalan dengan pandangan para ahli seperti G.R. Terry, John F. Mee, Louis A. Allen, maupun Mc. Namara, Henry Fayol, Harold Koontz dan Cyril O’donnel, maupun P. Siagian yang menempatkan perencanaan pada posisi yang sangat penting dan sangat menentukan (Hasibuan, 1997:6). Bahkan, Sa’ud dan Makmun (2011:4), terhadap pentingnya perencanaan ini dengan tegas menyatakan bahwa “perencanaan merupakan fungsi utama dan pertama dalam manajemen”.

1. Keberadaan dokumen rencana kerja sekolah

Perencanaan, dalam hal ini rencana kerja sekolah merupakan salah satu fungsi pengelolaan pendidikan di sekolah yang keberadaannya tentu memiliki peran yang sangat penting, bahkan memberi arah bagi fungsi-fungsi pengelolaan yang lain.

Namun demikian, tingginya kesadaran para informan terhadap pentingnya posisi dan peran rencana kerja sekolah dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah, serta pengakuan sebagian informan mengenai kepemilikan rencana kerja sekolah, justru berbanding terbalik dengan hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap keberadaan rencana kerja sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian dan menjadi tempat tugas para informan. Fakta ini menunjukkan bahwa para pengelola sekolah tersebut belum memberikan perhatian yang serius terhadap aspek perencanaan sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan sekolah.

Belum adanya perhatian yang serius dari para pengelola sekolah ini dapat diartikan bahwa para pengelola sekolah tersebut belum menyadari sepenuhnya fungsi perencanaan dalam pengelolaa, sebagaimana diungkapkan oleh Sa`ud dan Makmun (2011:5), diantaranya yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, sebagai alat bagi pengembangan *quality assurance* serta sebagai upaya untuk memenuhi *accountability* kelembagaan.

Kondisi seperti ini tentu memberi pengaruh terhadap kualitas produk pendidikan yang akan dihasilkan sekolah-sekolah tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Suyatno melalui penelitiannya tentang faktor-faktor penentu kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah menengah yang dilakukan di 30 SMA Swasta di Jakarta, bahwa untuk menciptakan produk yang berkualitas, selain peningkatan integritas kepala sekolah dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif, diperlukan perhatian secara seksama terhadap perencanaan pendidikan yang merupakan bagian dari manajemen. Tanpa perencanaan yang terarah dan jelas, dapat terjadi kesimpangsiuran di dalam komunitas kerja sekolah.

Selain itu, tidak lengkapnya rencana kerja sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, terutama rencana kerja tahunan, jelas tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yang menyebutkan bahwa rencana kerja sekolah terdiri dari rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007), maupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Artinya, bahwa rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dari perencanaan jangka menengah dalam bentuk aktivitas dan tindakan-tindakan yang riil dan terinci secara jelas yang sangat diperlukan keberadaannya oleh setiap sekolah karena rencana kerja tahunan tersebut merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.

Fakta lain, yaitu tidak dilakukannya pembaharuan terhadap rencana kerja sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, tidak sesuai dengan amanat Permendiknas No. 19 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa rencana kerja sekolah ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat. Begitu juga dengan pendapat Ranupandojo (1996:22) yang mengatakan bahwa salah satu ciri perencanaan yang baik adalah perencanaan tersebut harus selalu diperbaiki (diperbaharui) sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang memang selalu berubah.

1. Dasar perumusan rencana kerja sekolah

Sekolah menengah kejuruan (SMK) yang merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah diselenggarakan dengan tujuan menyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sebuah rencana kerja yang dirumuskan dengan dasar yang jelas, sehingga mampu menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi memasuki lepangan kerja.

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan para informan menyebutkan bahwa rencana kerja sekolah dirumuskan berdasarkan masukan, usul, saran baik dari guru, komite sekolah maupun masyarakat, faktor kebutuhan, baik kebutuhan sekolah maupun kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi dokumen rencana kerja sekolah sebelumnya.

Berbeda dengan data-data di atas, selama melakukan studi dekumentasi, peneliti justru tidak menemukan adanya hasil analisis terhadap kebutuhan yang dimaksud. Demikian juga dengan dokumen hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya. Terjadinya perbedaan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan data dan fakta yang diperoleh melalui studi dokumentasi, menunjukkan ketidakjelasan dasar perumusan rencana kerja sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini.

Perumusan rencana kerja sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini belum didasarkan pada pendekatan ketenagakerjaan atau kebutuhan tenaga kerja, yaitu pendekatan yang mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan (Sarbini dan Lina, 2011:55). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu meyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, Pasal 3:2).

Selain itu, peneliti juga tidak menemukan adanya hasil evaluasi diri sekolah maupun hasil analisis SWOT sebagai dasar dalam perumusan rencana kerja sekolah. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sa`ud dan Makmun (2011:42) bahwa perencana pendidikan harus mampu mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi proses perencanaan.

Faktor-faktor tersebut tentu sangat penting untuk diperhatikan dan dijadikan sebagai dasar dalam perumusan rencana kerja sekolah. Melalui analisis SWOT, para pengelola sekolah dapat mengetehui secara pasti kekurangan ataupun kelebihan dan peluang yang mereka miliki serta ancaman yang mereka hadapi. Melalui evaluiasi diri dan evaluasi rencana kerja, mereka dapat mengetahui tingkat ketercapaian dan keterlaksanaan rencana kerja sebelumnya, serta kebutuhan lapangan kerja, dan melalui analisis kebutuhan maupun pendekatan ketenagakerjaan mereka akan mengetahui peluang para

lulusan dalam mengisi maupun menciptakan lapangan kerja.

Dengan mengabaikan faktor-faktor tersebut, dapat berakibat tidak adanya prioritas kegiatan-kegiatan sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah akan cenderung tanpa arah, bersifat dadakan dan sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.

1. Komponen-komponen rencana kerja sekolah

Berkaitan dengan komponen-komponen yang termuat dalam rencana kerja sekolah, data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak mengetahui dengan baik komponen-komponen perencanaan yang termuat dalam rencana kerja sekolah mereka. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari para informan tersebut tidak pernah melihat (membaca) dokumen rencana kerja yang dimiliki sekolah.

Meskipun para informan tersebut mengaku pernah mengikuti rapat di sekolah membahas perencanaan yang berkaitan dengan kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta hubungan kemitraan, namun pembicaraan-pembicaraan tersebut hanya berupa wacana saja, karena dalam dokumen rencana kerja sekolah yang mereka miliki tidak ditemukan komponen-komponen tersebut secara lengkap, bahkan perencanaan pembiayaan atau anggaran, hampir tidak pernah dibahas secara terbuka dalam forum rapat. Demikian juga dengan dokumen rencana kerja dan anggaran sekolah yang tidak dimiliki oleh semua sekolah lokasi penelitian ini.

Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rohiat (2012:21) bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, sekolah memiliki berbagai macam bidang garapan, yaitu : (1) kurikulum; (2) kesiswaan; (3) personil/anggota; (4) sarana dan prasarana; (5) keuangan; (6) hubungan sekolah dan masyarakat; dan (7) layanan khusus.

Demikian juga dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang menyebutkan bahwa rencana kerja sekolah harus memuat ketentuan yang jelas mengenai : (1) kesiswaan, (2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, (4) sarana dan prasarana, (5) keuangan dan pembiayaan, (6) budaya dan lingkungan sekolah, (7) peran serta masyarakat dan kemitraan, dan (8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

Selain itu, komponen-komponen rencana kerja yang ada, dalam rencana kegiatannya justru lebih tepat dikatakan sebagai target yang ingin dicapai, belum menggambarkan tindakan nyata yang akan dilakukan maupun cara-cara yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Amirullah dan Randyah Hanafi (2002:49), bahwa perencanaan adalah suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kenyataan ini tentu akan memberi pengaruh terhadap kualitas para lulusan sekolah-sekolah tersebut, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Mariani (2009) pada sekolah-sekolah menengah (SMA/MA/SMK) negeri di Kota Tanjungbalai yang menyebutkan bahwa perencanaan terhadap sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat sesungguhnya berpengaruh nyata terhadap kualitas lulusan dalam mendapatkan kesempatan kerja.

Dengan tidak lengkapnya komponen-komponen perencanaan, juga dapat menyebabkan tidak maksimalnya pemenuhan aspek-aspek penunjang keberhasilan proses pendidikan yang bermuara pada kualitas lulusan.

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang rencana kerja sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah tersebut, dari data dan fakta-fakta yang terungkap baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi, akan dibahas berdasarkan aspek-aspek berikut :

1. Kemandirian

Kewenangan dan keleluasaan yang dimiliki sekolah dalam

mengatur dan mengurus dirinya sendiri harus dimulai dari perencanaannya, karena perencanaan merupakan titik awal dari semua proses pendidikan yang terjadi di sekolah, lebih jauh lagi bisa menjadi penentu dari hasil pendidikan.

Kemandirian dalam merancang dan merumuskan perencanaan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam rencana kerja sekolah yang dimiliki sekolah-sekolah lokasi penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rencana kerja yang dirumuskan tanpa memperhatikan kondisi nyata yang ada di sekolah yang disebabkan karena tidak adanya analisis mengenai kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, maupun analisis hasil evaluasi diri sekolah sebagai dasar dalam merumuskan rencana kerja sekolah.

Selain itu, adanya kesamaan program kegiatan dalam rencana kerja sekolah yang sesungguhnya memiliki kondisi yang berbeda, bahkan dengan jurusan yang berbeda juga masih terjadi pada sekolah-sekolah tersebut.

1. Kemitraan

Hubungan kemitraan yang dibangun oleh sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, yang pada dasarnya merupakan industri jasa, belum tergambar dalam rencana kerja sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, namun dalam prakteknya hubungan kemitraan yang dibangun, terutama dengan pihak dunia usaha/industri masih terbatas pada kerjasama dalam proses pembelajaran saja, belum mengarah kepada kerjasama dalam memenuhi kebutuhan lembaga atau instansi penerima produk jasa yang dihasilkan sekolah.

Kemitraan sekolah dengan dunia usaha/industri hanya didasarkan atas kebutuhan pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) atau yang juga sering disebut dengan pembelajaran sistem ganda (PSG) dan belum mengarah kepada pemanfaatan lulusan dalam mengisi lowongan kerja.

1. Partisipasi

Sekolah belum memberikan peluang kepada pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan orang tua/wali siswa (komite sekolah) maupun dunia usaha/industri untuk ikut berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan perencanaan sekolah secara maksimal, padahal pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki hak untuk ikut menentukan arah dan isi pendidikan. Keterlibatan masyarakat dan orang tua/wali siswa hanya sebatas diwakili oleh ketua pengurus komite sekolah dan pada urusan-urusan tertentu saja.

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi termasuk dalam perumusan rencana kerja sekolah belum terilhat pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya informan yang mengaku tidak memiliki dokumen rencana kerja sekolah, bahkan sebagian besar justru tidak pernah melihat apalagi membaca dan memahami perencanaan sekolah tersebut.

1. Akuntabilitas

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, yaitu keterlibatan dalam menentukan arah pendidikan di sekolah. Relevansi terhadap kebutuhan masyarakat dalam perencanaan menjadi kunci lain atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, karena pendidikan yang jauh dari tanggung jawab dan partisipasi masyarakat akan menjadi pendidikan yang asing dari masyarakat.

Tingkat partisipasi dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat, orang tua siswa dan dunia usaha/industri pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini masih tergolong rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah tersebut juga masih rendah.

1. **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pendidikan**

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah, data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini masih rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada sekolah-sekolah

lokasi penelitian ini, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan sebagian informan yang mengungkapkan tentang tidak adanya pertisipasi masyarakat, baik pihak komite sekolah, yayasan, dunia usaha/industri, apalagi tokoh masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah mereka. Hal ini juga didukung dengan hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti yang tidak menemukan satupun dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti partisipasi masyarakat, baik pihak komite sekolah, yayasan, dunia usaha/industri, maupun tokoh masyarakat dalam perumusan rencana kerja sekolah, baik berupa daftar hadir rapat maupun bukti-bukti lainnya. Bahkan komite sekolah sebagai bagian dari masyarakat pada dua dari enam sekolah lokasi penelitian ini, keberadaannya tidak jelas.

Data-data ini menunjukkan bahwa sekolah belum memberikan peluang yang cukup bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan rencana kerja sekolah. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Atmodiwirio (2000:35) bahwa sebagai bagian dari masyarakat, keberadaan sekolah sangat tergantung kepada keberadaan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, maka keterlibatan atau pertisipasi masyarakat menjadi sangat penting, bukan hanya berkaitan dengan pendanaan, tetapi dalam segala aspeknya, termasuk perencanaannya. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Kondisi seperti ini, selain dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan sekolah-sekolah lokasi penelitian ini, juga dapat mempengaruhi kualitas perencanaan yang dimiliki sekolah-sekolah terebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mc. Namara dkk. (2002), dalam analisisnya tentang perkembangan terakhir perencanaan pengembangan sekolah dan evaluasi seluruh sekolah di Republik Irlandia yang mendapati bahwa keterbukaan dan akuntabilitas publik menjamin terbentuknya perencanaan yang efektif. Karenanya, partisipasi aktif orang tua, guru, staf sekolah dan masyarakat luas sangat menentukan kualitas hasil perencanaan.

Dari keseluruhan data yang telah dipaparkan di atas, baik data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan para informan penelitian maupun hasil studi dokumentasi terhadap dokumen rencana kerja sekolah dan dokumen-dokumen lainnya serta hasil observasi terhadap perilaku para informan maupun kondisi sekolah-sekolah lokasi penelitian, maka secara ringkas sekolah-sekolah terebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok kategori berkaitan dengan rencana kerja sekolah, yaitu : 1) sekolah yang sama sekali tidak atau belum memiliki dokumen rencana kerja sekolah, 2) sekolah yang pernah memiliki rencana kerja jangka menengah sekolah namun tidak atau belum dilakukan pembaharuan terhadap rencana kerja jangka menengah, dan tidak atau belum memiliki rencana kerja tahunan/jangka pendek sekolah, 3) sekolah yang memiliki rencana kerja jangka menengah sekolah dan pernah memiliki rencana kerja tahunan/jangka pendek sekolah, namun tidak atau belum dilakukan pembaharuan terhadap dokumen rencana kerja tahunan/jangka pendek tersebut.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pendidikan di sekolah, sekolah-sekolah tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok kategori, yaitu : 1) sekolah yang tidak atau belum memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah, 2) sekolah yang pernah memberi ruang partisipasi bagi masyarakat, setidak-tidaknya komite sekolah dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah, meskipun tidak ada dokumen bukti tertulis atas partisipasi (keterlibatan) masyarakat dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah tersebut.

Adapun yang berkaitan dengan rumusan visi, misi dan tujuan sekolah, sekolah-sekolah tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok kategori, yaitu : (1) sekolah yang tidak atau belum memiliki rumusan visi, misi dan tujuan sekolah; (2) sekolah yang memiliki rumusan visi, misi dan tujuan sekolah; (3) sekolah yang memiliki lebih dari satu rumusan visi, misi dan tujuan sekolah.

Terjadinya kondisi-kondisi seperti ini, dikarenakan oleh beberapa alasan atau sebab, seperti : (1) gedung sekolah yang masih berstatus menumpang; (2) adanya kesibukan atau tugas pokok lain yang dimiliki terutama oleh kepala sekolah; (3) terjadinya pergantian kepala sekolah disebabkan karena kepala sekolah yang lama meninggal dunia, sementara kepala sekolah yang baru tidak memiliki pengalaman sebagai guru; (4) terjadinya dualisme kepemimpinan (jabatan kepala sekolah) disebabkan karena proses pergantian kepala sekolah yang dilakukan oleh pihak yayasan hanya bersifat lisan.

Akibat dari kondisi sekolah yang seperti ini, maka sekolah-sekolah tersebut berjalan statis dan apa adanya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengalami penurunan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

1. **Refleksi Penelitian**
2. **Kegiatan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu :

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini, peneliti menyusun topik dan contoh-contoh pertanyaan sebagai pemandu wawancara yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

1. Tahap pelaksanaan wawancara.

Proses wawancara yang dilakukan peneliti diawali dengan memberikan pemahaman kepada para informan penelitian di masing-masing sekolah lokasi penelitian tentang tujuan dan materi wawancara. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan *guidline* wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

1. Tahap pembuatan transkrip hasil wawancara.

Proses ini memakan waktu yang cukup lama, yang disebabkan karena cukup banyaknya informan dalam penelitian ini. Peneliti diharuskan mendengarkan rekaman hasil wawancara secara berulang-ulang dan sepotong demi sepotong untk mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan isi wawancara.

1. Tahap pelaksanaan studi dokumentasi.

pada tahap ini, peneliti meminta bantuan dari pihak sekolah (kepala sekolah, guru, pegawai/TU) untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan peneliti, seperti dokumen rencana kerja sekolah, baik rencana kerja jangka menengah maupun rencana kerja tahunan/jangka pendek dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti dokumen kurikulum, proposal-proposal, daftar hadir rapat dan lain-lain. Selanjutnya, peneliti mengkaji isi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti komponen-komponen rencana kerja sekolah, rumusan visi, misi dan tujuan sekolah dan lain-lain.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa posisi peneliti sebagai pengawas pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Lombok Timur yang secara hirarki kedinasan memiliki hak dan wewenang dalam mengawasi dan menilai perkembangan sekolah-sekolah menengah, termasuk pada SMK, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap obyektifitas informasi yang diberikan para informan

penelitian dalam wawancara dengan peneliti.

Karena itu, untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh tersebut, peneliti menjelaskan bahwa wawancara yang dilakukan peneliti sebatas untuk kepentingan penelitian dan penulisan karya ilmiah semata dan tidak berkaitan dengan tugas kepengawasan dan penilaian yang menjadi hak dan wewenang kedinasan peneliti.

Selain itu, wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan tidak seluruhnya dilakukan di sekolah-sekolah lokasi penelitian, tetapi ada juga yang dilakukan di rumah informan. Hal ini dilakukan peneliti agar wawancara dapat dilakukan dengan suasana yang lebih santai sehingga informan dapat memberikan data yang lebih obyektif.

1. **Kendala-kendala yang dihadapi Peneliti**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, misalnya penelitian ini belum bisa mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya pembaharuan dokumen rencana kerja sekolah maupun alasan pihak sekolah yang belum memberikan ruang dan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan rencana kerja sekolah.

Selain itu, dalam proses pengumpulan data, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi, beberapa kendala yang dihadapi peneliti antara lain :

* + - * 1. Kepala sekolah jarang berada di sekolah karena adanya kewajiban tugas di tempat lain, misalnya memiliki tugas pokok sebagai kepala sekolah di SD Negeri dan di SD-SMP Negeri Satu Atap, sebagai ketua KPUD Kabupaten Lombok Timur, sebagai PNS pada kantor dinas kesehatan, maupun guru tetap (PNS) pada sekolah lain. Demikian juga dengan informan lainnya yang sebagian besar tidak hanya mengajar pada sekolah-sekolah di lokasi penelitian ini, sehingga dibutuhkan waktu yang tepat untuk bisa bertemu langsung dengan para informan.
				2. Lemahnya sistem pengarsipan menyebabkan peneliti sulit menemukan dan memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan peneliti, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi peneliti untuk dapat melakukan pemeriksaan dokumen.
				3. Sekolah yang dipilih sebagai lokasi penelitian menyebar di enam kecamatan dan berjarak tempuh cukup jauh, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup banyak bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

**BAB V**

**SIMPULAN DAN SARAN**

1. **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada SMK swasta di Kabupaten Lombok Timur berkaitan dengan sistem pengelolaannya, khususnya pada aspek perencanaan. Fakta-fakta yang terungkap dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi para pengelola sekolah dan pengambil kebijakan khususnya pada jenjang pendidikan menengah.

Adapun simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah.**

Berkaitan dengan rumusan visi, misi dan tujuan sekolah, hasil penelitian ini menunjukkan : (1) keberadaan visi, misi dan tujuan sekolah belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan sekolah menuju sebuah kondisi ideal yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya sekolah-sekolah yang memiliki memiliki lebih dari satu rumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang diberlakukan pada saat yang bersamaan, (2) visi, misi dan tujuan sekolah yang dimiliki bukan merupakan visi, misi dan tujuan sekolah yang dirumuskan bersama berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi merupakan visi, misi dan tujuan sekolah yang dirumuskan oleh individu-individu yang ada di sekolah-sekolah tersebut, (3) tingkat perhatian dan pemahaman warga sekolah terhadap visi, misi dan tujuan sekolah yang dimiliki masih sangat rendah, bahkan tidak semua warga sekolah mengetahui visi, misi dan tujuan sekolah mereka, hal ini disebabkan karena sosialisasi dan penjelasan mengenai visi. misi dan tujuan sekolah tidak pernah dilakukan.

1. **Rencana Kerja Sekolah**

Berkaitan dengan rumusan rencana kerja sekolah, hasil penelitian ini menunjukkan: (1) keberadaan rencana kerja sekolah belum mendapat perhatian yang cukup dari para pengelola sekolah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sekolah yang memiliki rencana kerja sekolah yang lengkap, bahkan rencana kerja sekolah yang dimiliki hampir seluruhnya merupakan rencana kerja yang masa berlakunya sudah lewat, (2) sekolah tidak memiliki dasar yang jelas dalam perumusan rencana kerja sekolah, (3) rencana kerja sekolah yang dimiliki belum memenuhi seluruh komponen perencanaan secara lengkap sebagaimana diatur dalam standar pengelolaan sekolah. Demikian juga dengan uraian kegiatan yang belum sepenuhnya menggambarkan rencana kegiatan-kegiatan konkrit yang akan dilakukan, tetapi masih bersifat umum, dan bahkan dari pilihan kalimat yang digunakan, lebih tepat dikatakan sebagai target yang ingin dicapai.

1. **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pendidikan**

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada sekolah-sekolah lokasi penelitian ini masih terbilang rendah. Masyarakat belum diberi ruang dan kesempatan yang cukup untuk terlibat langsung dalam pengeloalaan sekolah, termasuk dalam perumusan perencanaan pendidikan, baik visi, misi dan tujuan sekolah maupun rencana kerja sekolah.

1. **Implikasi Hasil Penelitian**
2. **Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini sebagai berikut : (1) untuk merumuskan rencana kerja sekolah, dibutuhkan visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai dasar dan pedoman serta penunjuk arah yang menggambarkan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan dan merupakan cita-cita bersama segenap warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan; (2) untuk terselenggaranya proses pendidikan di sekolah dengan baik, dibutuhkan juga sebuah rencana kerja sebagai dasar dalam pengelolaan sekolah yang berisi rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, target yang ingin dicapai, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya, siapa yang akan mengerjakannya, dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Hal ini sangat penting karena keberhasilan program sekolah tak lepas dari pola perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) Untuk menjamin akuntabilitas sebuah rencana kerja sekolah, diperlukan partisipasi aktif semua pihak yang berkepentingan dalam proses perumusannya. Keterlibatan warga sekolah dan seluruh pihak yang berkepentingan akan menghasilkan sebuah rumusan rencana menjadi lebih baik, juga legalitas perencanaan tersebut menjadi bertambah kuat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan menjadi lebih tinggi.

1. **Implikasi Praktis**

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini sebagai berikut : (1) untuk dapat merumuskan rencana kegiatan di sekolah dengan arah dan tujuan yang jelas, para pengelola sekolah perlu merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah yang mencerminkan cita-cita bersama, yaitu terciptanya sebuah kondisi ideal yang diharapkan oleh seluruh warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan; (2) dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan dibutuhkan perhatian yang serius dari para pengelola sekolah untuk mewujudkan sebuah rencana kerja yang jelas dan transparan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah; (3) untuk mendorong partisipasi masyarakat, para pengelola sekolah perlu membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan seluruh warga sekolah dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses perumusan rencana kerja sekolah.

1. **S a r a n**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, maka dapat disampaikan

saran-saran kepada beberapa pihak, yaitu :

1. **Kepala Sekolah**

Kepala sekolah sebagai manajer pada sebuah lembaga pendidikandiharapkan dapat meningkatkan pemahamannya terhadap obyek yang akan dikelola dan bagaimana obyek itu dikelola, mampu mengidentifikasi dan merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, serta menuangkan rancangan kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk rencana kerja sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah diharapkan untuk terus menerus meningkatkan kompetensinya dalam menyusun rencana kerja sekolah dengan senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

1. **Penyelenggara Pendidikan (Yayasan)**

Pihak yayasan sebagai pemilik hak penyelengaraan pendidikan diharapkan lebih selektif dalam memilih, menunjuk dan menetapkan seseorang sebagai kepala sekolah. Kemampuan dalam mengelola pendidikan di sekolah hendaknya dijadikan sebagai pertimbangan utama,

bukan sekedar faktor kedekatan semata. Dengan demikian, keberlangsungan pendidikan dapat berjalan dan berkembang sebagaimana yang diharapkan.

1. **Pemegang Kebijakan**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebagai pemegang kebijakan pendidikan diharapkan lebih ketat dalam menerapkan standar dan syarat-syarat pendirian sekolah baru. Pemenuhan terhadap syarat-syarat pendirian sekolah baru kiranya dapat lebih diperhatikan. Hal ini penting, agar lembaga pendidikan yang ada tidak hanya tinggi pada kuantitasnya, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya.

Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga diharapkan lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sekolah. Misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan manajerial kepada para kepala sekolah swasta. Dengan demikian, diharapkan kualitas pengelolaan sekolah-sekolah swasta bisa lebih ditingkatkan dan disetarakan dengan sekolah-sekolah negeri.

1. **Peneliti Selanjutnya**

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih sangat sederhana dan terbatas, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengadakan kajian-kajian yang lebih mendalam pada fungsi-fungsi pengelolaan yang belum mampu dijangkau dalam penelitian ini. Karena baik buruknya kualitas pengelolaan sekolah akan sangat menentukan baik buruknya

kualitas output sebuah lembaga pendidikan.

Beberapa kajian yang dapat dijadikan wilayah penelitian antara lain : (1) Tingkat keterlaksanaan standar pengelolaan pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah; (2) pola rekrutmen kepala sekolah dan hubungannya dengan kemampuan pengelolaan sekolah; (3) Efektifitas kerjasama komite sekolah dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan

sekolah.

Dengan semakin banyaknya penelitian di bidang pengelolaan sekolah ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem pengelolaan sekolah yang baik, sehingga dapat memberikan andil bagi kemajuan pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amirullah dan Hanafi, Randyah. 2002. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Atmodiwirio, Soebagio. 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Ardadizya Jaya.

Barnawi dan Arifin, Mohammad. 2012. *Buku Pintar Mengelola Sekolah Swasta*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Danim, Sudarman. 2008. *Visi Baru Manajemen Sekolah : Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta : Bumi Aksara.

 . 2010. *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung : Alfabeta.

Fattah, Nanang. 2012. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Hasibuan, S.P., H. Malayu. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta : Toko Gunung Agung.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.

 . 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung : Rafika Aditama.

Mariani. 2009.  *Perencanaan Sumber Daya Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Sekolah Menengah Negeri di Kota Tanjungbalai*. Tesis (from : repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7252/1/09E01937.pdf). diakses 26-2-2015. 20.55.

Mc. Namara, Gerry. dkk. 2002. “*Whole-School Evaluation and Development*

*Planning : An Analysis of Recent Initiatives in Ireland*”. Journal of Educational Management & Administration. Vol 30(2) 201–211.

Nahdi, Hirjan. 2010. *Menata Kembali Pendidikan : Pemikiran Global melandasi Aksi Lokal*. Yogyakarta : Insyira.

Purwanto, M. Ngalim. 2003. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Ranupandojo, Heidjrachman. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : UPP-AMPYKPN.

Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya : Unesa University Press.

Rohiat. 2012. *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*. Bandung : Refika Aditama.

Sahabuddin, L. 2003. *Tesis : Studi Perencanaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Lombok Tengah*. Tesis pada PPs Unesa : tidak

diterbitkan.

Sarbini dan Lina, Neneng. 2011. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar*. Jakarta : Indek.

Sa’ud, Udin Sy. dan Makmun, Abin Sy. 2011. *Perencanaan Pendidikan : Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sedamayanti. 2009. *Reformasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik*. Bandung : Refika Aditama.

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Rafika Aditama.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sutanto. 2013. *Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah*.(from : [http://dikmen.kemdikbud.go.id/dak/Kebijakan%20Dan%20Program%20 Dikmen.pdf](http://dikmen.kemdikbud.go.id/dak/Kebijakan%20Dan%20Program%20%20Dikmen.pdf)*.*) diakses : 21-1-2015. 23:12.

Suyatno, Thomas. (.....). *Faktor-faktor Penentu Kualitas Pendidikan Menengah Umum di Jakarta*. (from : [http://www.stiks-tarakanita.ac.id/files/Jurnal %20Vol.%201%20No.%202/141.%20Faktor-faktor%20penentu%20 kualitas%20pendidikan%20SMU%20(%20Thomas).pdf](http://www.stiks-tarakanita.ac.id/files/Jurnal%20%20Vol.%201%20No.%202/141.%20Faktor-faktor%20penentu%20%20kualitas%20pendidikan%20SMU%20%28%20Thomas%29.pdf)). diakses 13-1-2015. 15.17.

Terry, R. George. dan Rue, W. Leslie. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen* (terjemahan dari *Principles of Management* oleh Ticoalu, G.A). Jakarta : Bumi Aksara.

Tilaar, H.A.R. 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tirtarahardja, Umar dan S L La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tubin, Dorit. 2009. “*Planning an Innovative School : How to Reduce the Likelihood of Regression toward the Mean*”. Journal of Educational Management Administration & Leadership. Vol 37(3) 404–421.

Usman, Husaini. 2006. *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahjosumidjo. 2003. *Kepemimpinan Kepala Sekolah : Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus : Desain dan Metode* (terjemahan dari *Case Study Research :Design and Methods* oleh M. Djauzi Mudzakir). Jakarta : Raja Grafindo Persada.

**Peraturan dan Perundang-Undangan**

Depdiknas. 2008. *Manajemen Sekolah*. Jakarta : Pusdiklat Pegawai Depdiknas.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang *Pendidikan Menengah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan*.

Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang *Peminatan Pada Pendidikan Menengah*.

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah*.

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang *Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*.